



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-4.OT.01.01 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

MENTERI HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 854);
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.
- KESATU : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
- KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
 2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan; dan
 3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, perkembangan/kemajuan kinerja.
- KETIGA : Seluruh Kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit ...

1. Unit utama bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi baik tingkat pusat maupun kantor wilayah;
2. Pelaporan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui tautan yang akan disampaikan kemudian;
3. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya; dan
4. Evaluasi capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan setiap Triwulan.

KELIMA : Menteri Hukum dapat memberikan sanksi dalam hal:

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan rencana aksi atas perjanjian kinerja; dan
2. Kepala Satuan Kerja yang telah melaksanakan rencana aksi atas perjanjian kinerja tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026
MENTERI HUKUM,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
MENTERI HUKUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,41 Indeks	TW I	Penyampaian surat dinas perihal penyusunan instrumen survei kepuasan masyarakat kepada BSK Hukum	100%	Surat dinas perihal penyusunan instrumen survei kepuasan masyarakat kepada BSK Hukum	Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN dan BPSDM Hukum
				TW II	Menyusun instrumen survei kepuasan masyarakat dengan BSK Hukum	100%	Laporan penyusunan instrumen survei kepuasan masyarakat	Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN dan BPSDM Hukum
				TW III	Menyusun instrumen survei kepuasan masyarakat dengan BSK Hukum	100%	Laporan penyusunan instrumen survei kepuasan masyarakat	Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN dan BPSDM Hukum
				TW IV	1. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN dan BPSDM;	100%	1. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN dan BPSDM;	BSK Hukum
					2. Pengukuran Indeks Penegakan Hukum Pelindungan KI;		2. Laporan Pengukuran Indeks Penegakan Hukum Pelindungan KI;	Ditjen KI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung	Penanggung Jawab
					3. Pengukuran Indeks Penegakan Hukum AHU; dan		3. Laporan Pengukuran Indeks Penegakan Hukum AHU; dan	Ditjen AHU
					4. Pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan keperdataan.		4. Laporan Pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan keperdataan.	Ditjen AHU
		Indeks Budaya Hukum	0,84 Indeks	TW I		0%		
				TW II		0%		
				TW III		0%		
				TW IV	Pengukuran Indeks Budaya Hukum	0,84 Indeks	Laporan Indeks Budaya Hukum	BPHN
		Indeks Materi Hukum	0,52 Indeks	TW I		0%		
				TW II		0%		
				TW III		0%		
				TW IV	Pengukuran Indeks Materi Hukum	0,52 Indeks	Laporan Indeks Materi Hukum	BPHN
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum	90,40 Indeks	TW I	1. Menyusun rencana kerja tahunan RB; 2. Melakukan sosialisasi rencana kerja tahunan RB;	100%	1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal hal RKT RB Tahun 2026; 2. Laporan sosialisasi sesuai dengan tata naskah dinas	Setjen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung	Penanggung Jawab
	Kementerian Hukum				3. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 4. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 5. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.		(undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 3. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 4. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 5. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.	
				TW II	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 2. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 3. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 2. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.	Setjen
				TW III	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 2. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 3. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 2. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.	Setjen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung	Penanggung Jawab
				TW IV	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 2. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 3. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 2. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.	Setjen



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW I	1. Menyusun rencana kerja tahunan RB; 2. Melakukan sosialisasi rencana kerja tahunan RB; 3. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan RB melalui e-RB; 4. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 5. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal hal RKT RB Tahun 2026; 2. Laporan sosialisasi sesuai dengan tata naskah dinas (undangan, absensi, notula, dokumentasi); 3. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 4. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 5. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan RB melalui e-RB; dan 2. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan RB melalui e-RB; dan	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.		2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan RB melalui e-RB; dan 2. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya implementasi SAKIP Kementerian Hukum	Nilai SAKIP Kementerian Hukum	78,52 (BB)	TW I	1. Penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja di lingkungan Kementerian Hukum; 2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2025; dan 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum Tahun 2025.	100%	1. Keputusan Menteri tentang Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum; 2. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2025; dan 3. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum Tahun 2025.
				TW II	1. Penilaian mandiri AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;	100%	1. Berita Acara Penilaian Mandiri AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Evaluasi AKIP secara berjenjang di lingkungan Kementerian Hukum; 3. Evaluasi AKIP tahap akhir oleh APIP; 4. Panel evaluasi AKIP Unit Eselon I; 5. Penyusunan rencana tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP Kementerian Hukum yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Revisi Kepmenkum terkait Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 7. Revisi Kepmenkum terkait Pedoman SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum; 8. Penginputan realisasi dan capaian kinerja seluruh satuan kerja Kementerian Hukum pada aplikasi E-Performance; 9. Penyusunan LKjIP Setjen dan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026; dan 10. Monitoring dan evaluasi terhadap PKO Triwulan I Tahun 2026.		2. Berita Acara Evaluasi AKIP secara berjenjang di lingkungan Kementerian Hukum; 3. Berita Acara Evaluasi AKIP tahap akhir oleh APIP Itjen; 4. Berita Acara Panel Evaluasi AKIP Unit Eselon I; 5. Matriks Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi AKIP Kementerian Hukum yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Kepmenkum terkait Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 7. Kepmenkum terkait Pedoman SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum; 8. Laporan Realisasi dan Capaian Kinerja seluruh satuan kerja Kementerian Hukum pada aplikasi E-Performance; 9. Dokumen LKjIP Setjen dan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026; dan 10. Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap PKO Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung evaluasi AKIP pada aplikasi ESR	100%	1. Laporan Pemenuhan data dukung evaluasi AKIP pada

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Evaluasi AKIP Internal (Setjen) oleh Inspektorat Jenderal; 3. Verifikasi terhadap data dukung AKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR); 4. Penjaminan kualitas terhadap data dukung AKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR) oleh Inspektorat Jenderal; 5. Tindak lanjut atas hasil Penjaminan Kualitas data dukung AKIP pada aplikasi ESR; 6. Monitoring dan evaluasi terhadap PKO Triwulan II Tahun 2026; dan 7. Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.		aplikasi ESR Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Berita Acara Evaluasi AKIP Internal (Setjen) oleh Inspektorat Jenderal; 3. Laporan verifikasi terhadap data dukung AKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR); 4. Berita Acara Penjaminan Kualitas terhadap Data Dukung AKIP pada Aplikasi E-Sakip Reviu (ESR) oleh Inspektorat Jenderal; 5. Laporan tindak lanjut atas hasil Penjaminan Kualitas data dukung AKIP pada aplikasi ESR; 6. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap PKO Triwulan II Tahun 2026; dan 7. Laporan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap PKO Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2026.	100%	1. Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap PKO Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							Kementerian Hukum Tahun 2026.
2	Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan Agile	Nilai Indeks Kapabilitas Kelembagaan	1,85 (C)	TW I	Implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum	100%	Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel
				TW II	1. Penyusunan cetak biru penataan organisasi Kementerian Hukum; 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum; dan 3. Implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum.	100%	1. Dokumen Cetak Biru Penataan Organisasi Kementerian Hukum; 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum; dan 3. Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel.
				TW III	Implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum	100%	Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel
				TW IV	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 2. Menyusun kriteria dan uraian jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Hukum; 3. Perubahan sistem kerja dan pola kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum; dan 4. Implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum.	100%	1. Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum tentang Kriteria dan Uraian Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum; 3. Dokumen meliputi: a. Peraturan Menteri Hukum tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							b. Keputusan Menteri Hukum tentang Pola Kerja Fleksibel; serta 4. Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel.
		Indeks Pelayanan Publik	4,60 Indeks	TW I	Sosialisasi tentang kebijakan pelayanan publik kepada seluruh satuan kerja	100%	Laporan Sosialisasi tentang kebijakan pelayanan publik kepada seluruh satuan kerja
				TW II	Pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kepada seluruh satuan kerja	100%	Laporan pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kepada seluruh satuan kerja
				TW III	Melakukan evaluasi mandiri (<i>self assessment</i>) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja berdasarkan aspek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100%	Laporan hasil evaluasi mandiri (<i>self assessment</i>) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja berdasarkan aspek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
				TW IV	Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada peraturan terkait	100%	Dokumen monitoring tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada peraturan terkait
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kementerian Hukum	3,24 Nilai	TW I	Sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM <i>Online</i> berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian	100%	Laporan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM <i>Online</i> berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Hukum		seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
				TW II	Sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum	100%	Laporan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
				TW III	Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik Kementerian Hukum	100%	Laporan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik Kementerian Hukum
				TW IV	Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik Kementerian Hukum	100%	Laporan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik Kementerian Hukum
		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,00 Opini	TW I	Pelaksanaan evaluasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025	100%	Laporan pelaksanaan evaluasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025
				TW II	Penyusunan rencana aksi atas hasil evaluasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025	100%	Dokumen rencana aksi atas hasil evaluasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025
				TW III		0%	
				TW IV	1. Pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi	100%	1. Laporan pendampingan pelaksanaan opini pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026; dan 2. Pemberian apresiasi kepada satuan kerja terkait penyelenggaraan pelayanan publik.		penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026; dan 2. Laporan pemberian apresiasi kepada satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik (sesuai tata naskah dinas).
3	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran Kementerian Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum	91 Nilai	TW I	1. Penyiapan bahan penyusunan Postur RKA-K/L Kementerian Hukum TA 2027; 2. Penyusunan Postur RKA-K/L Detil Belanja Kementerian Hukum TA 2027; 3. Penyusunan Postur RKA-K/L Detil Belanja Kementerian Hukum TA 2027; dan 4. <i>Assessment</i> RO Unit Eselon I Kementerian Hukum TA 2026.	100%	1. Dokumen penyiapan bahan Penyusunan Postur RKA-K/L Kementerian Hukum TA 2027; 2. Dokumen penyusunan Postur RKA-K/L Detil Belanja Kementerian Hukum TA 2027; 3. Dokumen penyusunan Postur RKA-K/L Detil Belanja Kementerian Hukum TA 2027; dan 4. Laporan <i>Assessment</i> RO Unit Eselon I Kementerian Hukum TA 2026.
				TW II	Menyusun laporan nilai kinerja perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan nilai kinerja perencanaan penganggaran Kementerian Hukum Triwulan I Tahun 2026
				TW III	1. Sosialisasi hasil pengukuran indeks kualitas perencanaan penganggaran Kementerian Hukum; dan 2. Menyusun laporan nilai kinerja perencanaan penganggaran	100%	1. Laporan sosialisasi hasil pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum; dan 2. Laporan nilai kinerja perencanaan penganggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Kementerian Hukum Triwulan II Tahun 2026.		Kementerian Hukum Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Sinkronisasi Renja dengan Renstra; dan 2. Menyusun Laporan Nilai kinerja perencanaan pelanggaran Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan Sinkronisasi Renja dengan Renstra; dan 2. Laporan Nilai kinerja perencanaan pelanggaran Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026.
		Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum	91,5 Indeks	TW I	Penyusunan rencana kerja serta penandaan/ <i>tagging output</i> prioritas nasional Kementerian Hukum melalui Aplikasi KRISNA	100%	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kementerian Hukum
				TW II		0%	
				TW III	Sinkronisasi SAKTI dengan KRISNA sesuai perubahan informasi pada Renstra Kementerian Hukum 2025-2029	100%	Rekap data Komparasi SAKTI KRISNA
				TW IV	Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum TA. 2025 melalui Aplikasi KRISNA (jika terjadi perubahan Renstra di tahun 2025)	100%	Dokumen Rencana Kerja Perubahan yang memuat output Prioritas nasional dari Aplikasi KRISNA yang berisikan Sasaran <i>Output</i> PN dan targetnya Catatan: Jika tidak ada perubahan, lampirkan surat keterangan
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi LHE	100%	TW I	Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait	100%	Dokumen tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Kementerian Hukum	RB yang ditindaklanjuti			pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum		Birokrasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum
				TW II	Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum	100%	Dokumen tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum
				TW III	1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum; dan 2. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum.	100%	1. Dokumen rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum; dan 2. Dokumen tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada Aplikasi ERB Kementerian Hukum.
				TW IV	Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait	100%	Dokumen tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum		Birokrasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum pada aplikasi ERB Kementerian Hukum
		Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB	100%	TW I	1. Menyusun rencana kerja tahunan RB; 2. Melakukan sosialisasi rencana kerja tahunan RB; 3. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan RB melalui e-RB; 4. Melakukan verifikasi Rencana Kerja Tahunan RB; dan 5. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal hal RKT RB Tahun 2026 2. Laporan sosialisasi sesuai dengan tata naskah dinas (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 3. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 4. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 5. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 2. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 3. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 2. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 2. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 2. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.		3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Melakukan pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan melalui e-RB; 2. Melakukan verifikasi rencana kerja tahunan RB; dan 3. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan RB.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; 2. <i>Capture</i> capaian hasil verifikasi RKT RB; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BIRO KEUANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kementerian Hukum	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum	WTP (4)	TW I	1. Melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Tahun 2025; dan 2. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 <i>Unaudited</i> .	100%	1. Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN; dan 2. Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 <i>Unaudited</i> .
				TW II	1. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025; dan 2. Melaksanakan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025.	100%	1. Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 <i>Audited</i> ; dan 2. Surat evaluasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan Keuangan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026; dan 2. Surat evaluasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Surat evaluasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026.
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	TW I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025	100%	Surat penyampaian evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tahun 2025
				TW II	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025.	100%	1. Surat penyampaian evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2026; dan 2. Surat penyampaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025.
				TW III	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja	100%	1. Surat penyampaian evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2026.		2. Surat penyampaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW IV	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Surat penyampaian evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Surat penyampaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2026.
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	1. Menyampaikan Surat Dinas perihal Tindak Lanjut Temuan BPK yang Belum Sesuai Rekomendasi atas laporan keuangan kepada Satker yang bersangkutan; dan 2. Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Sekretariat Jenderal.	100%	1. Surat Dinas perihal Tindak Lanjut Temuan BPK yang Belum Sesuai Rekomendasi atas Laporan Keuangan kepada Satker yang bersangkutan; dan 2. Laporan pelaksanaan rapat (undangan, absensi, notula dan dokumentasi) dan matriks percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melakukan inventarisasi dan menyampaikan data dukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Sekretariat Jenderal yang belum sesuai rekomendasi ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).		2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Sekretariat Jenderal yang belum sesuai rekomendasi	100%	Laporan pelaksanaan rapat (undangan, absensi, notula dan dokumentasi) dan matriks percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI (Jika tidak terdapat temuan dapat menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Melakukan inventarisasi dan menyampaikan data dukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Sekretariat Jenderal yang belum sesuai rekomendasi ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan laporan keuangan (jika tidak terdapat temuan atau sudah selesai ditindaklanjuti dapat menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian data dukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Sekretariat Jenderal yang belum sesuai rekomendasi ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BIRO BARANG MILIK NEGARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN	Indeks Pengelolaan Aset	3,61 Indeks	TW I	1. Penelaahan rencana kebutuhan Barang Milik Negara tahun 2027 Kementerian Hukum; 2. Penyusunan laporan barang pengguna <i>Unaudited</i> Tahun 2025 Kementerian Hukum; 3. Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian BMN tingkat pengguna barang Semester II Tahun 2025; 4. Inventarisasi atas persetujuan pemanfaatan BMN yang terbit atas nama Kementerian Hukum dan HAM dan masih berlaku pada Kementerian Hukum; dan 5. Penetapan pengasuransian BMN di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil penelaahan RK BMN Kementerian Hukum tahun 2027; 2. Laporan barang pengguna <i>unaudited</i> Tahun 2025 Kementerian Hukum; 3. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Semester II tahun 2025; 4. Dokumen rekapitulasi persetujuan pemanfaatan BMN yang terbit atas nama Kementerian Hukum dan HAM dan masih berlaku pada Kementerian Hukum; dan 5. Dokumen penetapan pengasuransian BMN meliputi: a. Penetapan pengasuransian BMN Kementerian Hukum Tahun 2026; dan b. Surat dinas perihal pengusulan pengasuransian BMN Kementerian Hukum Tahun 2026.
				TW II	1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN di lingkungan Kementerian Hukum; 2. Penyusunan laporan barang pengguna <i>Audited</i> Tahun 2025 Kementerian Hukum; 3. Penerbitan SK Penghapusan BMN;	100%	1. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN; 2. Laporan barang pengguna <i>Audited</i> Tahun 2025 Kementerian Hukum; 3. Laporan rekapitulasi SK penghapusan BMN;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Melakukan evaluasi pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barang; dan 5. Inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan/ sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan.		4. Surat dinas perihal evaluasi hasil pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barang; dan 5. Dokumen inventarisasi BMN meliputi: a. Surat dinas perihal Hasil Inventarisasi BMN berupa Tanah yang Belum Memiliki Dokumen Kepemilikan; dan b. Laporan inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan (sesuai tata naskah dinas).
				TW III	1. Penyusunan laporan barang pengguna Semester I Tahun 2026 Kementerian Hukum; dan 2. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tingkat Pengguna Barang Semester I Tahun 2026,	100%	1. Laporan barang pengguna Semester I Tahun 2026 Kementerian Hukum; dan 2. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Penyusunan rekapitulasi Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN; 2. Usulan penghapusan (pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan) BMN rusak berat; 3. Penerbitan SK penghapusan BMN;	100%	1. Rekapitulasi hasil realisasi PNBP Semester I Tahun 2026; 2. Laporan usulan penghapusan BMN rusak berat dari Satuan Kerja (sesuai tata naskah dinas); 3. Laporan rekapitulasi SK penghapusan BMN (sesuai Tata Naskah Dinas);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Melakukan evaluasi pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barang; dan 5. Melakukan tindak lanjut atas hasil Inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan/ sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan.		4. Surat dinas perihal evaluasi hasil pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barang; dan 5. Laporan tindak lanjut atas hasil inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan/ sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan.
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	82 Indeks	TW I	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-kontrak Tahun 2025.	100%	1. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; dan 2. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-Kontrak (menggunakan data tahun 2025).
				TW II	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-kontrak Tahun 2025.	100%	1. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; dan 2. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-Kontrak (menggunakan data tahun 2025).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-kontrak Tahun 2025.	100%	1. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; dan 2. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-Kontrak (menggunakan data tahun 2025).
				TW IV	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-kontrak Tahun 2025; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan SDM PPBJ; dan 4. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan UKPBJ.	100%	1. Surat dinas perihal Hasil Monitoring dan EVALUASI ATAS PENGUMUMAN RUP melalui aplikasi SIRUP; 2. Surat dinas perihal hasil monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-Purchasing dan penginputan e-Kontrak (menggunakan data tahun 2025); 3. Laporan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan SDM PPBJ; dan 4. Laporan pelaksanaan evaluasi kelembagaan UKPBJ.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terinternalisasinya Budaya ASN Berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum	Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum	77.2% (kategori A, Sehat)	TW I	Evaluasi hasil Survei BerAKHLAK tahun 2025	100%	Laporan evaluasi hasil survei BerAKHLAK tahun 2025
				TW II	Internalisasi <i>branding</i> secara masif pelaksanaan Program Budaya BerAKHLAK (sosialisasi/pelatihan/webinar/kampanye digital)	100%	Laporan pelaksanaan internalisasi <i>branding</i> program budaya Berakhlak (sosialisasi/pelatihan/webinar/kampanye digital)
				TW III	Monitoring dan evaluasi lapangan untuk melihat tingkat implementasi Internal BerAKHLAK di Unit-Unit kerja secara langsung	100%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi lapangan implementasi <i>internal branding</i> BerAKHLAK pada Unit Kerja
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei Penilaian (<i>Self Assessment</i>) BerAKHLAK; dan 2. Penyampaian surat dinas perihal Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Internal <i>Core Value</i> BerAKHLAK.	100%	1. Laporan pelaksanaan Penilaian (<i>Self Assessment</i>) Survei BerAKHLAK; dan 2. Surat dinas perihal rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Survei Internal <i>Core Value</i> BerAKHLAK.
		Indeks Sistem Merit Kementerian Hukum	373.5 (kategori IV, Sangat baik)	TW I	1. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait regulasi, sistem penilaian baru dan pembentukan Tim Kerja Pemenuhan Data Indeks Sistem Merit; dan 2. Pelaksanaan manajemen kinerja dan karier (terdiri dari SK, <i>talent pool</i> dan rotasi/promosi).	100%	1. Laporan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan 2. Laporan monitoring kinerja ASN tahun sebelumnya.
				TW II	1. Pelaksanaan manajemen kinerja dan karier (terdiri dari SK, <i>talent pool</i> dan rotasi/promosi); 2. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem merit; dan	100%	1. Surat permohonan terkait uji kompetensi <i>talent pool</i> ; 2. Laporan monitoring dan evaluasi sistem merit yang berisi rekomendasi tindak lanjut perbaikan; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026.		3. Dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan manajemen kinerja dan karier (terdiri dari SK, <i>talent pool</i> dan rotasi/promosi); dan 2. Validasi dan rekonsiliasi internal data dukung yang terkumpul bersama unit-unit teknis terkait untuk memastikan keakuratan.	100%	1. Laporan monitoring kinerja ASN semester tahun berjalan; dan 2. Laporan Validasi dan Rekonsiliasi Data Indeks Sistem Merit.
				TW IV	1. Pelaksanaan manajemen kinerja dan karier (terdiri dari SK, <i>talent pool</i> dan rotasi/promosi); dan 2. Penilaian dan pengunggahan data dukung final melalui sistem yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).	100%	1. Laporan <i>talent pool</i> dan implementasi karier; dan 2. Bukti pengunggahan data dukung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Reformasi Hukum Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum	100 indeks	TW I	1. Membuat surat dinas perihal Pembahasan IRH di lingkungan Kementerian Hukum kepada BSK;	100%	1. Surat dinas perihal pembahasan IRH di lingkungan Kementerian Hukum kepada BSK; 2. Dokumen SK Tim; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Membuat SK Tim Pemantauan dan Evaluasi IRH di lingkungan Kementerian Hukum; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum.		3. Laporan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum.
				TW II	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027	100%	Laporan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum
				TW III	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027; dan 2. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027 periode Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027 periode Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027; dan 2. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev terkait data dukung IRH di lingkungan Kementerian Hukum guna

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Hukum guna persiapan penilaian tahun 2027 periode Triwulan III Tahun 2026.		persiapan penilaian tahun 2027 periode Triwulan III Tahun 2026.
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	90,5 nilai	TW I	1. Menyusun SK Tim PPID; dan 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/pembinaan kepada pengelola layanan PPID tentang keterbukaan informasi publik Kementerian Hukum,	100%	1. SK Tim PPID; dan 2. Laporan kegiatan sosialisasi/pembinaan sesuai dengan tata naskah dinas.
				TW II	1. Menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kementerian Hukum; dan 2. Melakukan pemutakhiran informasi publik di website PPID.	100%	1. SK DIP dan DIK; dan 2. <i>Capture</i> menu informasi publik Kementerian Hukum pada website PPID.
				TW III	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/pembinaan kepada pengelola layanan PPID tentang keterbukaan informasi publik Kementerian Hukum	100%	Laporan kegiatan sosialisasi / pembinaan sesuai dengan tata naskah dinas
				TW IV	Melakukan pemenuhan data dukung monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	100%	Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik
3	Meningkatnya Citra Positif	Indeks Citra Positif Kementerian Hukum	80,5 indeks	TW I	1. Menyusun rencana publikasi; 2. Melakukan publikasi berita positif; dan 3. Melakukan pemantauan media konvensional, <i>online</i> dan media sosial.	100%	1. Laporan rencana publikasi; 2. Laporan publikasi berita positif; dan 3. Laporan pemantauan media konvensional, <i>online</i> dan media sosial.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Melakukan publikasi berita positif; 2. Melakukan pemantauan media konvensional, <i>online</i> dan media sosial; 3. Menyusun Kepmenkum tentang Manajemen Kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum; 4. Melakukan pembinaan kehumasan kepada humas UKE 1, Kantor Wilayah, dan UPT; dan 5. Melakukan evaluasi pemberitaan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan publikasi berita positif; 2. Laporan pemantauan media konvensional, online, dan media sosial; 3. Dokumen <i>draft</i> Kepmenkum tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kementerian Hukum; 4. Laporan kegiatan pembinaan kehumasan; dan 5. Laporan evaluasi pemberitaan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.
				TW III	1. Melakukan publikasi berita positif; 2. Melakukan pemantauan media konvensional, online, dan media sosial; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemberitaan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan publikasi berita positif; 2. Laporan pemantauan media konvensional, online, dan media sosial; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemberitaan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Melakukan publikasi berita positif; 2. Melakukan pemantauan media konvensional, <i>online</i> dan media sosial;	100%	1. Laporan publikasi berita positif; 2. Laporan pemantauan media konvensional, <i>online</i> dan media sosial;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melakukan sosialisasi Kepmenkum tentang Manajemen Kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum; dan 4. Melakukan evaluasi pemberitaan Kementerian Hukum Semester II Tahun 2026.		3. Laporan kegiatan sosialisasi Kepmenkum tentang Manajemen Kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum; dan 4. Laporan evaluasi pemberitaan Kementerian Hukum Semester II Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BIRO UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum	Nilai tingkat Pengawasan Arsip	8,95 Nilai	TW I	1. Pembentukan tim layanan informasi kearsipan; 2. Pembentukan tim penilai pemusnahan arsip; 3. Pembentukan tim pengawasan internal kearsipan; 4. Pembentukan tim alih media arsip; 5. Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasan; 6. Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik (E-arsip); dan	100%	1. SK Tim Layanan Informasi Kearsipan; 2. SK Tim Penilai Pemusnahan Arsip; 3. SK Tim Pengawasan Internal Kearsipan; 4. SK Tim Alih Media Arsip; 5. Laporan penggunaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 6. Laporan pemeliharaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					7. Melakukan pembinaan kearsipan.		7. Laporan pembinaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi).
				TW II	1. Membuat layanan kearsipan <i>helpdesk</i> ; 2. Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); 3. Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasan; 4. Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik (E-arsip); dan 5. Melakukan pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal.	100%	1. Laporan pembuatan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 2. Laporan SIKN (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 3. Laporan aplikasi (Perka ANRI, SK, Nodis, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 4. Laporan pemeliharaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); dan 5. Laporan pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal.
				TW III	1. Pengelolaan arsip inaktif 2. Penggunaan pengelolaan arsip aktif 3. Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasan; 4. Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik (E-arsip);	100%	1. Laporan pengelolaan (Perka ANRI, SK, Nodis, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 2. Laporan penggunaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 3. Laporan pengawasan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 4. Laporan penggunaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
2	Meningkatnya Kepuasan Layanan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal	Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan	3,70 Indeks		5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan kearsipan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.		5. Laporan pemeliharaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi).
				TW IV	1. Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasan; 2. Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik (E-arsip); dan 3. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Sekretaris Jenderal.I	100%	1. Laporan aplikasi (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); 2. Laporan pemeliharaan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi); dan 3. Laporan pemusnahan (Perka ANRI, SK, undangan, notula, daftar hadir dan dokumentasi).
				TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.		kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Indeks SPBE Kementerian Hukum	2,60 Indeks	TW I	1. Melakukan evaluasi arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029; 2. Melakukan inventarisasi risiko SPBE tahun 2026;	100%	1. Laporan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana 2025 – 2029; 2. Dokumen meliputi: a. Formulir 2.0 Konteks Risiko SPBE; b. Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Menyusun Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE; 4. Menyusun ruang lingkup manajemen keamanan informasi; 5. Menyusun rencana program kerja keamanan SPBE; 6. Menyusun rencana manajemen perubahan SPBE; 7. Menganalisis dampak dan kesiapan perubahan SPBE organisasi; dan 8. Menyusun pengembangan rencana manajemen perubahan SPBE jangka pendek.		c. Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE. 3. Formulir 1.0 Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE; 4. Formulir Penetapan Ruang Lingkup Manajemen Keamanan Informasi; 5. Formulir Perencanaan MKI; 6. Dokumen rencana manajemen perubahan SPBE yang meliputi: a. Formulir A1 (Penetapan Tujuan Perubahan SPBE); dan b. Formulir A2 (Identifikasi Komite Manajemen Perubahan SPBE); 7. Dokumen analisis dampak dan kesiapan perubahan SPBE organisasi yang meliputi: a. Formulir B1 (Analisis Dampak Perubahan SPBE); b. Formulir B2 (Analisis Kesiapan Perubahan SPBE Individu); dan c. Formulir B3 (Analisis Kesiapan Perubahan SPBE Organisasi); serta 8. Formulir C (Pengembangan Rencana Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Menyelenggarakan dukungan pengoperasian peningkatan kapasitas SDM dan anggaran keamanan SPBE; 2. Menyusun pelaporan implementasi manajemen perubahan SPBE jangka pendek; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan SPBE.	100%	1. Formulir Dukungan Pengoperasian; 2. Formulir D (Implementasi Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek); dan 3. Formulir E1 (Pemantauan dan Evaluasi Perubahan SPBE Jangka Pendek).
				TW III	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum; 2. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum; 3. Menyusun rencana manajemen perubahan SPBE; dan 4. Menyusun daftar register aset TIK Kementerian Hukum.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum (format laporan sesuai TNDE); 2. Surat dinas pengantar Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dari Kapusdatin kepada seluruh satker; 3. Dokumen rencana manajemen perubahan SPBE meliputi: a. Formulir A3 (Identifikasi Agen Perubahan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal); dan b. Formulir A4 (Identifikasi Unit Pelaksana Manajemen Perubahan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal); serta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							4. Keputusan Menteri tentang Daftar Register Aset TIK Kementerian Hukum.
				TW IV	1. Melakukan evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko SPBE; 2. Pelaksanaan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029; 3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan keamanan SPBE; 4. Melakukan perbaikan berkelanjutan dari hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan keamanan SPBE; 5. Menyusun pelaporan implementasi manajemen perubahan SPBE jangka pendek; 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan SPBE;	100%	1. Laporan evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko SPBE; 2. Laporan Pelaksanaan peta rencana SPBE 2025 - 2029 (Surat Hasil Rekomendasi (<i>Clearance</i>) dari Kemenkomdigi, KemenpanRB, dan KemenPPN/Bappenas) ; 3. Formulir Evaluasi; 4. Formulir Perbaikan Berkelanjutan; 5. Formulir D (Implementasi Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek); 6. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan SPBE yang meliputi: a. Formulir E1 (Pemantauan dan Evaluasi Perubahan SPBE Jangka Pendek); b. Formulir E2 (Pemantauan dan Evaluasi Perubahan SPBE Jangka Panjang); dan c. Formulir E3 (Semula Menjadi Perubahan);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					7. Pelaporan pelaksanaan SPBE Kementerian Hukum tahun 2026; 8. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE oleh Pusdatin tahun 2026; dan 9. Melakukan tindak lanjut atas evaluasi arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029.		7. Laporan Pelaksanaan SPBE pada masing-masing satker/ Kementerian Hukum (format laporan sesuai TNDE); 8. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin (format laporan sesuai TNDE); dan 9. Laporan tindak lanjut evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana 2025 – 2029.
		Persentase layanan Kementerian Hukum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	50%	TW I	Integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>	100%	Laporan integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>
				TW II	Integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>	100%	Laporan integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>
				TW III	Integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>	100%	Laporan integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>
				TW IV	Integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>	100%	Laporan integrasi layanan pada aplikasi <i>SuperApps</i>
		Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	2,60 Indeks	TW I	1. Internalisasi pelaksanaan data statistik sektoral; dan 2. Menyampaikan surat pelaksanaan kegiatan statistik yang akan diajukan pada penilaian EPSS pada tahun berikutnya ke Unit Eselon I terkait.	100%	1. Laporan internalisasi pelaksanaan data statistik sektoral; dan 2. Surat pelaksanaan data statistik sektoral ke seluruh Unit Eselon I.
				TW II	Mengusulkan kegiatan statistik pada Aplikasi Romantik BPS	100%	Dokumen surat usulan rekomendasi kegiatan statistik pada aplikasi Romantik BPS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Melakukan inventarisasi daftar Data Kementerian; dan 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan statistik.	100%	1. Surat penyampaian daftar inventarisasi data pada Unit Eselon I yang berisi matriks daftar data dengan melampirkan bukti inventarisasi daftar data (<i>screenshot</i> atau <i>url/link</i> atau excel daftar data); dan 2. Laporan Monev kegiatan statistik.
				TW IV	Melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik	100%	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,61 Indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.		
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Sekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Sekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Sekretariatan Triwulan III Tahun 2026.



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN III

Keputusan Menteri Hukum

Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026

Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional	Indeks Penegakan Hukum AHU	3,53 Indeks	TW I	1. Penyusunan data dan informasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum; 2. Pelaksanaan pemberian keterangan ahli di bidang hukum pidana; 3. Pelaksanaan tindak lanjut penanganan permintaan bantuan hukum timbal balik / <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> ; dan 4. Pemetaan PPNS yang masih bekerja di bidang penyelidikan / penyidikan.	100%	1. Laporan pemanfaatan data dan informasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum; 2. Laporan pemberian data capaian keterangan ahli di bidang hukum pidana; 3. Laporan tindak lanjut penanganan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik / <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> ; dan 4. Laporan pemetaan PPNS yang masih bekerja di bidang penyelidikan / penyidikan.
				TW II	1. Penyusunan data dan informasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum; 2. Pelaksanaan pemberian keterangan ahli di bidang hukum pidana; 3. Pelaksanaan tindak lanjut penanganan permintaan bantuan hukum timbal balik / <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> ; dan	100%	1. Laporan pemanfaatan data dan informasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum; 2. Laporan pemberian data capaian keterangan ahli di bidang hukum pidana; 3. Laporan tindak lanjut penanganan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Pemetaan PPNS yang masih bekerja di bidang penyelidikan / penyidikan.		balik / <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> ; dan 4. Laporan pemetaan PPNS yang masih bekerja di bidang penyelidikan / penyidikan.
				TW III	1. Penyusunan data dan informasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum; 2. Pelaksanaan pemberian keterangan ahli di bidang hukum pidana; 3. Pelaksanaan tindak lanjut penanganan permintaan bantuan hukum timbal balik / <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> ; dan 4. Pemetaan PPNS yang masih bekerja di bidang penyelidikan / penyidikan.	100%	1. Laporan pemanfaatan data dan informasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum; 2. Laporan pemberian data capaian keterangan ahli di bidang hukum pidana; 3. Laporan tindak lanjut penanganan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik / <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> ; dan 4. Laporan pemetaan PPNS yang masih bekerja di bidang penyelidikan / penyidikan.
				TW IV	Pengukuran Indeks Penegakan Hukum AHU	3,53	Laporan pengukuran Indeks Penegakan Hukum AHU
2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU	3,72 Indeks	TW I	1. Penyusunan standar layanan administrasi hukum umum tahun 2026; 2. Internalisasi standar layanan administrasi hukum umum tahun 2026; dan 3. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU.	100%	1. Dokumen standar layanan AHU tahun 2026; 2. Laporan Internalisasi Standar Layanan AHU; dan 3. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan AHU.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Evaluasi pelaksanaan standar layanan administrasi hukum umum Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU.	100%	1. Laporan evaluasi pelaksanaan standar layanan administrasi hukum umum Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan AHU.
				TW III	1. Evaluasi pelaksanaan standar layanan administrasi hukum umum Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU.	100%	1. Laporan evaluasi pelaksanaan standar layanan administrasi hukum umum Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan AHU.
				TW IV	Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU	3,72 Indeks	Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan AHU
3	Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan	Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	3,15 Indeks	TW I	1. Penyusunan standar kemudahan berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus; 2. Internalisasi standar kemudahan berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus; dan 3. Penyelenggaraan Survei Kemudahan Berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran	100%	1. Dokumen standar kemudahan berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus; 2. Laporan internalisasi standar kemudahan berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus; dan 3. Laporan hasil Survei Kemudahan Berusaha pada Layanan Pendaftaran Pendirian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus.		Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
				TW II	1. Evaluasi pelaksanaan Survei Kemudahan Berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penyelenggaraan Survei Kemudahan Berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus.	100%	1. Laporan evaluasi pelaksanaan survei kemudahan berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan Hasil Survei Kemudahan Berusaha pada Layanan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
				TW III	1. Evaluasi pelaksanaan Survei Kemudahan Berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus Triwulan II Tahun 2026; dan	100%	1. Laporan evaluasi pelaksanaan survei kemudahan berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus Triwulan II Tahun 2026; dan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Penyelenggaraan Survei Kemudahan Berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus.		2. Laporan hasil Survei Kemudahan Berusaha pada Layanan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
				TW IV	Penyelenggaraan Survei Kemudahan Berusaha pada layanan pendaftaran pendirian perseroan terbatas, pendirian perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia serta pendaftaran kurator dan pengurus	3,15	Laporan hasil Survei Kemudahan Berusaha pada Layanan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW I	1. Sosialisasi RKT (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Evaluasi RKT oleh APIP.		2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.		2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PERDATA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU	Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan	96%	TW I	1. Melakukan penyebaran informasi terkait dengan standar pelayanan kepada <i>stakeholder</i> ; dan 2. Melakukan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan.	100%	1. Laporan penyebaran informasi terkait dengan standar pelayanan kepada <i>stakeholder</i> ; dan 2. Laporan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan.
				TW II	Melakukan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan	100%	Laporan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan
				TW III	Melakukan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan	100%	Laporan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan
				TW IV	Melakukan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan	100%	Laporan monitoring pelaksanaan layanan hukum perdata sesuai dengan standar pelayanan
	Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang Diselesaikan	98%	98%	TW I	1. Melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan layanan hukum perdata; dan 2. Melakukan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata.	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi kepada <i>stakeholder</i> baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan 2. Laporan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata.
				TW II	1. Melakukan koordinasi kepada <i>stakeholder</i> tentang pelaksanaan layanan hukum perdata; dan	100%	1. Laporan hasil koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dengan layanan hukum perdata; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melakukan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata.		2. Laporan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata.
				TW III	Melakukan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata	100%	Laporan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata
				TW IV	Melakukan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata	100%	Laporan monitoring penyelesaian layanan hukum perdata
2	Meningkatnya Kinerja Kurator Keperdataan	Persentase Kurator Keperdataan dengan Kinerja “Baik”.	91%	TW I	Melakukan koordinasi kepada Kurator Keperdataan di 5 Balai Harta Peninggalan	100%	Laporan koordinasi kepada Kurator Keperdataan di 5 Balai Harta Peninggalan
				TW II	1. Melakukan koordinasi kepada Kurator Keperdataan di 5 Balai Harta Peninggalan; dan 2. Melakukan uji kompetensi teknis Kurator Keperdataan.	100%	1. Laporan koordinasi kepada Kurator Keperdataan di 5 Balai Harta Peninggalan; dan 2. Laporan pelaksanaan uji kompetensi Kurator Keperdataan.
				TW III	1. Melakukan koordinasi kepada Kurator Keperdataan di 5 Balai Harta Peninggalan; dan 2. Melakukan pelatihan Kurator Keperdataan.	100%	1. Laporan koordinasi kepada Kurator Keperdataan di 5 Balai Harta Peninggalan; dan 2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kurator keperdataan
				TW IV	Melakukan Evaluasi Teknis Kinerja Kurator Keperdataan	100%	Laporan evaluasi kinerja kurator keperdataan.
3	Meningkatnya Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia	84%	TW I	Melakukan koordinasi terkait kemudahan sistem pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia	100%	Laporan pelaksanaan koordinasi kemudahan sistem pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia
				TW II	Melakukan penyusunan kebijakan kemudahan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia	100%	Dokumen <i>draft</i> kebijakan kemudahan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia
				TW III	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait mengenai	100%	Laporan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait mengenai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kebijakan kemudahan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia		kebijakan kemudahan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia
				TW IV	Melakukan penghitungan survei kemudahan pendaftaran jaminan fidusia	100%	Laporan hasil survei kemudahan pendaftaran jaminan fidusia
		Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus	82%	TW I	1. Melakukan koordinasi terkait kemudahan sistem layanan kurator dan pengurus; dan 2. Melakukan persiapan awal penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Perubahan Permekumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.	100%	1. Laporan hasil koordinasi terkait kemudahan sistem layanan kurator dan pengurus; dan 2. Laporan hasil pembahasan awal penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Perubahan Permekumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.
				TW II	1. Lanjutan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Perubahan Permekumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; dan 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait peningkatan layanan kurator dan pengurus.	100%	1. Laporan hasil penyusunan dan pembahasan lanjutan terkait rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Perubahan Permekumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; dan 2. Laporan hasil koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait peningkatan layanan kurator dan pengurus.
				TW III	1. Lanjutan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Perubahan	100%	1. Laporan hasil penyusunan dan pembahasan lanjutan terkait rancangan Peraturan Menteri

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Permekumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; dan 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait peningkatan layanan kurator dan pengurus.		Hukum tentang Perubahan Permekumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; dan 2. Laporan hasil koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait peningkatan layanan kurator dan pengurus.
				TW IV	Melakukan pengukuran Survei Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus	100%	Laporan hasil Survei Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PIDANA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli dalam Mendukung Penegakan Hukum	Persentase Keterangan Ahli yang Diberikan Sesuai Permintaan	96%	TW I	Penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan
				TW II	Penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan
				TW III	1. Penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan keterangan ahli di

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 2. Monitoring tindak lanjut permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).		bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 2. Laporan hasil monitoring tindak lanjut permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 2. Melakukan onitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan keterangan ahli di bidang hukum pidana.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan keterangan ahli di bidang hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan keterangan ahli di bidang hukum pidana.
2	Terselenggaranya Penempatan Sumber Daya Manusia PPNS Sesuai Bidangnya	Persentase PPNS yang Bekerja di Bidang Penyelidikan dan/atau Penyidikan	86%	TW I	1. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Penyusunan kajian tata kelola PPNS.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Laporan penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Laporan penyusunan kajian tata kelola PPNS.
				TW II	1. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Penyusunan kajian tata kelola PPNS.		2. Laporan penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Laporan penyusunan kajian tata kelola PPNS.
				TW III	1. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Penyusunan kajian tata kelola PPNS.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Laporan penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Laporan penyusunan kajian tata kelola PPNS.
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Penyusunan kajian tata kelola PPNS.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Laporan penguatan legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di wilayah; dan 3. Laporan penyusunan kajian tata kelola PPNS.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU	Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan	96%	TW I	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.
				TW II	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan;	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.		2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.
				TW III	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari,	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.		pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan sesuai Standar Pelayanan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR sesuai Standar Pelayanan; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai Standar Pelayanan; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS yang sesuai Standar Pelayanan.
		Persentase Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang Diselesaikan	98%	TW I	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS.		4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS.
				TW II	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS.	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS.
				TW III	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR;	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS.		3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS.
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Penyelesaian permohonan GAAR; 3. Penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan 4. Penyelesaian permohonan administrasi PPNS.	100%	1. Laporan dan dokumentasi penyelesaian permohonan pengambilan teraan sidik jari, pengidentifikasian sidik jari, perumusan sidik jari, pendokumentasian arsip sidik jari dan pemberian keterangan sidik jari yang telah memenuhi persyaratan dan telah diselesaikan; 2. Laporan penyelesaian permohonan GAAR; 3. Laporan penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana; dan 4. Laporan penyelesaian permohonan administrasi PPNS.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT TATA NEGARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU	Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan	96%	TW I	Penyelesaian. layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan
				TW II	Penyelesaian. layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan
				TW III	Penyelesaian. layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan
				TW IV	Penyelesaian. layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan Standar Pelayanan
		Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang Diselesaikan	98%	TW I	Penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar
				TW II	Penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar
				TW III	Penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar
				TW IV	Penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara yang telah dinyatakan lengkap dan benar	100%	Laporan penyelesaian layanan administrasi hukum tata negara meliputi permohonan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan layanan pendaftaran badan hukum partai politik yang telah dinyatakan lengkap dan benar

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT OTORITAS PUSAT HUKUM INTERNASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terlaksananya Tindak Lanjut Pembentukan Perjanjian dan/atau Permintaan MLA dan Ekstradisi sesuai Kewenangan Otoritas Pusat	Persentase Pembentukan Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti	97,5%	TW I	Pelaksanaan tindak lanjut pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>
				TW II	Pelaksanaan tindak lanjut pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>
				TW III	Pelaksanaan tindak lanjut pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>
				TW IV	Pelaksanaan tindak lanjut pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap pembentukan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>
		Persentase Permintaan MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti	97,5%	TW I	Penanganan permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> yang diterima
				TW II	Penanganan permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> yang diterima
				TW III	Penanganan permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> yang diterima
				TW IV	Penanganan permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i>	100%	Laporan proses tindak lanjut terhadap permintaan <i>Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi</i> yang diterima
2	Meningkatnya Layanan Administrasi	Tingkat Kepatuhan Layanan	96%	TW I	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan Direktorat OPHI sesuai Standar Pelayanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan		TW II	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan Direktorat OPHI sesuai Standar Pelayanan
				TW III	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan Direktorat OPHI sesuai Standar Pelayanan
				TW IV	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan Direktorat OPHI sesuai Standar Pelayanan
		Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang Diselesaikan	98%	TW I	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI
				TW II	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI
				TW III	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI
				TW IV	Penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan administrasi OPHI

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT BADAN USAHA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Dimanfaatkannya Data dan Informasi Badan Usaha dalam Penegakan Hukum	Persentase Data dan Informasi Badan Usaha yang Dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) Berdasarkan Kerja Sama	92%	TW I	Penyusunan data dan informasi korporasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum	100%	Laporan data dan informasi korporasi berdasarkan kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
				TW II	Penyusunan data dan informasi korporasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum	100%	Laporan data dan informasi korporasi berdasarkan kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
				TW III	Penyusunan data dan informasi korporasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum	100%	Laporan data dan informasi korporasi berdasarkan kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
				TW IV	Penyusunan data dan informasi korporasi yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum	100%	Laporan data dan informasi korporasi berdasarkan kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha	Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan	96%	TW I	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan
				TW II	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan
				TW III	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Persentase Layanan Administrasi Badan Usaha yang Diselesaikan	98%	TW IV	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha sesuai Standar Pelayanan
				TW I	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha
				TW II	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha
				TW III	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha
				TW IV	Penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha	100%	Laporan penyelesaian permohonan layanan pada Direktorat Badan Usaha
3	Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha	Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas	87%	TW I	Penyusunan instrumen Survei Kemudahan Berusaha Pendirian Perseroan Terbatas	100%	Laporan penyusunan Instrumen Survei Kemudahan Berusaha Pendirian Perseroan Terbatas
				TW II	Melakukan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan terbatas kepada <i>stakeholders</i>	100%	Laporan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan terbatas kepada <i>stakeholders</i>
				TW III	Melakukan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan terbatas kepada <i>stakeholders</i>	100%	Laporan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan terbatas kepada <i>stakeholders</i>
				TW IV	Pengukuran Survei Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas	100%	Laporan pengukuran tingkat kemudahan pendirian perseroan terbatas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan	87%	TW I	Penyusunan instrumen Survei Kemudahan Berusaha Pendirian Perseroan Perorangan	100%	Laporan penyusunan instrumen survei kemudahan berusaha pendirian Perseroan Perorangan
				TW II	Melakukan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan perorangan kepada <i>stakeholders</i>	100%	Laporan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan perorangan kepada <i>stakeholders</i>
				TW III	Melakukan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan perorangan kepada <i>stakeholders</i>	100%	Laporan sosialisasi kemudahan berusaha pendirian perseroan perorangan kepada <i>stakeholders</i>
				TW IV	Pengukuran Survei Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan	100%	Laporan pengukuran tingkat kemudahan pendirian perseroan perorangan

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU	Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen AHU	87%	TW I	Penyusunan dokumen SLA	100%	Dokumen <i>Draft</i> SLA
				TW II	1. Pengesahan dokumen SLA; dan 2. Penyusunan Laporan Capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II (<i>sampling</i>).	100%	1. Dokumen SLA yang telah ditandatangani; dan 2. Laporan capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II (<i>sampling</i>).
				TW III	Penyusunan Laporan Capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II	100%	Laporan capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Penyusunan Laporan Capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II	100%	Laporan capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II
		<i>Mean Time to Respond</i> (MTTR) terhadap Serangan Siber ke Ditjen AHU	1 Jam	TW I	Respon layanan siber yang terkena serangan siber	100%	Laporan respon layanan dari insiden siber (<i>cyber incident report</i>) Ditjen AHU
				TW II	Respon layanan siber yang terkena serangan siber	100%	Laporan respon layanan dari insiden siber (<i>cyber incident report</i>) Ditjen AHU
				TW III	Respon layanan siber yang terkena serangan siber	100%	Laporan respon layanan dari insiden siber (<i>cyber incident report</i>) Ditjen AHU
				TW IV	Respon layanan siber yang terkena serangan siber	100%	Laporan respon layanan dari insiden siber (<i>cyber incident report</i>) Ditjen AHU



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN IV

Keputusan Menteri Hukum

Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026

Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional	Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	3,06 Indeks	TW I	1. Pengesahan buku petunjuk teknis bantuan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual di wilayah; 2. Melakukan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 3. Menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran ki secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat dan wilayah; dan 4. Melakukan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.	100%	1. Dokumen buku petunjuk teknis bantuan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual di wilayah; 2. Laporan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 3. Laporan penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran ki secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat; dan 4. Laporan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.
				TW II	1. Melakukan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 2. Menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran KI secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat dan wilayah Semester I Tahun 2026; dan 3. Melakukan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan	100%	1. Laporan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI Triwulan II Tahun 2026; 2. Laporan penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran KI secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat Semester I Tahun 2026; dan 3. Laporan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.		Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.
				TW III	1. Melakukan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 2. Menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran KI secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat dan wilayah; dan 3. Melakukan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.	100%	1. Laporan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 2. Laporan penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran KI secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat; dan 3. Laporan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.
				TW IV	1. Peningkatan kuantitas/kualitas jumlah SDM bersertifikasi PPNS dan/atau mediator di wilayah dan pusat yang ditempatkan di bidang penegakan hukum; 2. Melakukan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 3. Menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran KI secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat; dan 4. Melakukan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.	100%	1. Laporan Peningkatan kuantitas/kualitas jumlah SDM bersertifikasi PPNS dan/atau mediator di wilayah dan pusat yang ditempatkan di bidang penegakan hukum; 2. Laporan penutupan/ pemblokiran situs pelanggar KI; 3. Laporan penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran KI secara litigasi dan non litigasi di tingkat pusat; dan 4. Laporan pengukuran hasil Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual disertai rekomendasi perbaikan.
2	Meningkatnya Kepuasan Pelindungan dan pemanfaatan KI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	3,36 Indeks	TW I	1. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Pembentukan tim penyelesaian <i>backlog</i> paten;	100%	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Dokumen SK Tim Penyelesaian <i>Backlog</i> Paten;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI			3. Identifikasi jumlah dokumen <i>backlog</i> yang menjadi target penyelesaian; 4. Pelaksanaan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 5. Monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; 6. Pelatihan SDM pembantu pemeriksaan formalitas paten 7. Pengesahan PKS antara DJKI dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kekayaan intelektual di wilayah; 8. Pengesahan PKS antara DJKI dengan Kemenparekraf untuk mendorong kekayaan intelektual di wilayah; dan 9. Pengesahan PKS antara DJKI dengan Ditjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mendorong inovasi yang dilindungi kekayaan intelektual.		3. Laporan identifikasi jumlah dokumen <i>backlog</i> yang menjadi target penyelesaian; 4. Laporan Pelaksanaan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 5. Laporan Monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; 6. Laporan Pelaksanaan Pelatihan SDM pembantu pemeriksaan formalitas paten Monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; 7. Dokumen PKS antara DJKI dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri; 8. Dokumen PKS antara DJKI dengan Kemenparekraf; dan 9. Dokumen PKS antara DJKI dengan Ditjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
				TW II	1. Melakukan survei Kepuasan Masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 3. Monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; 4. Menyusun rencana pengembangan sistem <i>dashboard</i>	100%	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Laporan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 3. Laporan monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					monitoring permohonan kantor wilayah hingga pada tahap pasca permohonan (sebagai sarana untuk pendampingan layanan permohonan di wilayah) ; 5. Integrasi data lagu daerah pada PDLM; dan 6. Sinergitas antar-<i>stakeholder</i> untuk mengimplementasikan kebijakan Pembiayaan Berbasis KI.		4. Laporan rancangan pengembangan sistem <i>dashboard</i> monitoring; 5. Laporan integrasi lagu daerah pada PDLM; dan 6. Laporan koordinasi antar-<i>stakeholder</i> untuk melaksanakan implementasi kebijakan Pembiayaan Berbasis KI.
				TW III	1. Melakukan survei Kepuasan Masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 3. Monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; dan 4. Mengembangkan sistem <i>dashboard</i> monitoring permohonan kantor wilayah hingga pada tahap pasca permohonan (sebagai sarana untuk pendampingan layanan permohonan).	100%	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Laporan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 3. Laporan monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; dan 4. Laporan Pengembangan sistem <i>dashboard</i> monitoring permohonan Kantor Wilayah.
				TW IV	1. Melakukan survei Kepuasan Masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 3. Monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; 4. Penyusunan laporan hasil penyelesaian <i>backlog</i> paten; 5. Fasilitasi pengumpulan bahan/kajian dalam rangka	100%	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Laporan penyelesaian dokumen <i>backlog</i> paten; 3. Laporan monitoring pelaksanaan penyelesaian <i>backlog</i> paten; 4. Laporan Akhir penyelesaian <i>backlog</i> paten; 5. Bahan penyusunan <i>draft</i> NA Revisi UU Merek; dan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					penyusunan NA dan RUU Merek; dan 6. Pelaksanaan Pelatihan IP <i>Valuation</i> .		6. Laporan Pelaksanaan Pelatihan IP <i>Valuation</i> .
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,4 Indeks	TW I	1. Pengesahan PKS antara DJKI dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kekayaan intelektual di wilayah; 2. Pengesahan PKS antara DJKI dengan Kemenparekraf untuk mendorong kekayaan intelektual di wilayah; 3. Pengesahan PKS antara DJKI dengan Ditjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mendorong inovasi yang dilindungi kekayaan intelektual; dan 4. Menyusun rancangan program tindak lanjut pemanfaatan kawasan berbasis KI (HC) atas wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan karya cipta.	100%	1. Dokumen PKS DJKI dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri; 2. Dokumen PKS DJKI dengan Kemenpar; 3. Dokumen PKS DJKI dengan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi; dan 4. Dokumen <i>draft</i> Rancangan program Tindak Lanjut pemanfaatan kawasan berbasis KI (Hak Cipta) atas wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Karya Cipta.
				TW II	1. Sinergitas antar- <i>stakeholder</i> untuk mengimplementasikan kebijakan Pembiayaan Berbasis KI; dan 2. implementasi program tindak lanjut pemanfaatan kawasan berbasis KI (HC) atas wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan karya cipta.	100%	1. Laporan koordinasi antar- <i>stakeholder</i> untuk melaksanakan implementasi kebijakan Pembiayaan Berbasis KI; dan 2. Laporan implementasi tindak lanjut pemanfaatan kawasan KI.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	Penguatan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih	100%	Laporan kegiatan penguatan merek kolektif
				TW IV	1. Penguatan forum bisnis IG; 2. Revitalisasi dan penguatan IP <i>Marketplace</i> sebagai Platform Komersialisasi Kekayaan Intelektual; 3. Fasilitasi pelatihan IP <i>Valuation</i> ; dan 4. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual.	100%	1. Laporan forum bisnis IG; 2. Laporan revitalisasi dan penguatan IP <i>marketplace</i> sebagai Platform Komersialisasi Kekayaan Intelektual; 3. Laporan terkait fasilitasi pelatihan IP <i>valuation</i> ; dan 4. Laporan Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual.
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW I	1. Sosialisasi RKT (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).		temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.		pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.		2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	85%	TW I	1. Penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); 2. Melakukan penyusunan standar pelayanan HCDI; dan 3. Sosialisasi peningkatan pemahaman layanan HCDI.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan layanan HCDI; 2. Laporan penyusunan standar pelayanan HCDI; dan 3. Laporan Sosialisasi peningkatan pemahaman layanan HCDI.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		terhadap Standar Pelayanan		TW II	1. Penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); dan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan HCDI Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan Penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi layanan HCDI Semester I Tahun 2026.
				TW III	1. Penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); 2. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev layanan HCDI Semester I Tahun 2026; dan 3. Melakukan studi tiru ke luar negeri perihal standar pelayanan HCDI.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev layanan HCDI Semester I Tahun 2026; dan 3. Laporan studi tiru ke luar negeri perihal standar pelayanan HCDI.
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); dan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan HCDI Semester II Tahun 2026.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan layanan HCDI (Hak Cipta, Desain Industri dan KIK); dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi layanan HCDI Semester II Tahun 2026.
		Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait	95%	TW I	1. Penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.
				TW III	1. Penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan pencatatan hak cipta; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan hak cipta.
		Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri	80%	TW I	1. Penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.
				TW II	1. Penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan desain industri yang terdaftar; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan desain industri.
		Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	75%	TW I	1. Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar; 2. Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi; 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; 4. Melakukan pembuatan Surat Edaran Direktur Jenderal kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum perihal koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Komunitas Asal; dan 5. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan integrasi data kekayaan intelektual komunal.	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar; 2. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi; 3. Laporan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; 4. Surat Edaran Direktur Jenderal kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum perihal koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Komunitas Asal; dan 5. Laporan Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait pelaksanaan integrasi data kekayaan intelektual komunal.
				TW II	1. Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar;	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi; 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi Triwulan I Tahun 2026.		2. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi; 3. Laporan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar; 2. Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi; 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar; 2. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi; 3. Laporan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar; 2. Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi;	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang terdaftar; 2. Laporan Penghitungan permohonan KIK yang tervalidasi;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melakukan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi Triwulan III Tahun 2026.		3. Laporan Monitoring dan evaluasi permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan KIK yang terdaftar dan tervalidasi triwulan III tahun 2026;
2	Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta	Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta	20%	TW I	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; dan 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; dan 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta.
				TW II	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pencatatan hak cipta Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pencatatan hak cipta.
				TW III	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan pencatatan hak cipta Semester I Tahun 2026.		perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan pencatatan hak cipta Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta; dan 3. Melakukan Monev tentang peningkatan pencatatan hak cipta semester II Tahun 2026.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan hak cipta; 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, pelaku seni dan instansi terkait dengan pencatatan hak cipta; dan 3. Laporan Monev tentang peningkatan pencatatan hak cipta Semester II Tahun 2026.
3	Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri	Persentase Desain Industri terdaftar	75%	TW I	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; dan 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan instansi terkait dengan pendaftaran desain industri.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; dan 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan instansi terkait dengan pendaftaran desain industri.
				TW II	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					instansi terkait dengan pendaftaran desain industri; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pendaftaran desain industri Semester I Tahun 2026.		instansi terkait dengan pendaftaran desain industri; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pendaftaran desain industri Semester I Tahun 2026.
				TW III	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan instansi terkait dengan pendaftaran desain industri; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan pendaftaran desain industri Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan instansi terkait dengan pendaftaran desain industri; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pendaftaran desain industri Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan instansi terkait dengan pendaftaran desain industri; dan 3. Melakukan Monev tentang peningkatan pendaftaran	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pendaftaran desain industri; 2. Laporan sosialisasi dan pendampingan kepada perguruan tinggi, UMKM dan instansi terkait dengan pendaftaran desain industri; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					desain industri Semester II Tahun 2026.		pendaftaran desain industri Semester II Tahun 2026.
4	Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	25%	TW I	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; dan 2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; dan 2. Laporan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK.
				TW II	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; 2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pencatatan KIK Semester I tahun 2026.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; 2. Laporan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pencatatan KIK Semester I tahun 2026.
				TW III	1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; 2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tentang	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; 2. Laporan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tentang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					peningkatan pencatatan KIK Semester I tahun 2026.		peningkatan pencatatan KIK Semester I tahun 2026.
				TW IV	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pencatatan KIK; 2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pencatatan KIK Semester II tahun 2026.	100%	1. Laporan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pencatatan KIK; 2. Laporan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat adat dengan pencatatan KIK; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan pencatatan KIK Semester II tahun 2026.
5	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri	Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja "Baik"	90%	TW I	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"; dan 2. Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa Desain Industri yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Desain Industri di tahun berjalan); dan 2. Laporan Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri.
				TW II	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"; 2. Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Desain Industri Triwulan I tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Desain Industri di tahun berjalan); 2. Laporan Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Desain Industri Triwulan I tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"; 2. Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri; 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Desain Industri Triwulan II tahun 2026; dan 4. Melakukan peningkatan pemahaman bagi JF Pemeriksa Desain Industri.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Desain Industri di tahun berjalan); 2. Laporan Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri; 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Desain Industri Triwulan II tahun 2026; dan 4. Laporan peningkatan pemahaman bagi JF Pemeriksa Desain Industri.
				TW IV	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"; 2. Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Desain Industri Triwulan III tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Desain Industri di tahun berjalan); 2. Laporan Evaluasi Kinerja Pemeriksa Desain Industri; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Desain Industri Triwulan III tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	90%	TW I	1. Melakukan pendampingan permohonan merek; 2. Melakukan layanan pemeriksaan substantif merek; 3. Melakukan layanan pasca merek terdaftar; 4. Melakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Melakukan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Melakukan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Melakukan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.	100%	1. Laporan pendampingan permohonan merek; 2. Laporan layanan pemeriksaan substantif merek; 3. Laporan layanan pasca merek terdaftar; 4. Laporan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Laporan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Laporan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Laporan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan 8. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.
				TW II	1. Melakukan pendampingan permohonan merek; 2. Melakukan layanan pemeriksaan substantif merek;	100%	1. Laporan pendampingan permohonan merek; 2. Laporan layanan pemeriksaan substantif merek;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melakukan layanan pasca merek terdaftar; 4. Melakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Melakukan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Melakukan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Melakukan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.		3. Laporan layanan pasca merek terdaftar; 4. Laporan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Laporan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Laporan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Laporan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan 8. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.
				TW III	1. Melakukan pendampingan permohonan merek; 2. Melakukan layanan pemeriksaan substantif merek; 3. Melakukan layanan pasca merek terdaftar; 4. Melakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Melakukan layanan koordinasi pengajuan permohonan	100%	1. Laporan pendampingan permohonan merek; 2. Laporan layanan pemeriksaan substantif merek; 3. Laporan layanan pasca merek terdaftar; 4. Laporan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Laporan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Melakukan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Melakukan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.		6. Laporan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Laporan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan 8. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.
				TW IV	1. Melakukan pendampingan permohonan merek; 2. Melakukan layanan pemeriksaan substantif merek; 3. Melakukan layanan pasca merek terdaftar; 4. Melakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Melakukan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Melakukan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Melakukan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan	100%	1. Laporan pendampingan permohonan merek; 2. Laporan layanan pemeriksaan substantif merek; 3. Laporan layanan pasca merek terdaftar; 4. Laporan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 5. Laporan layanan koordinasi pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; 6. Laporan layanan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis; 7. Laporan layanan pasca Indikasi Geografis terdaftar; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Tingkat Validasi Sertifikat Merek	90%		8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.		8. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan merek dan permohonan Indikasi Geografis.
				TW I	1. Penghitungan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.	100%	1. Laporan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.
				TW II	1. Penghitungan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.	100%	1. Laporan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.
				TW III	1. Penghitungan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.	100%	1. Laporan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.	100%	1. Laporan permohonan merek yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan merek.
		Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis	92%	TW I	1. Penghitungan Permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Penghitungan Permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.
				TW III	1. Penghitungan Permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.
				TW IV	1. Penghitungan Permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis yang <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan Indikasi Geografis.
2	Meningkatnya Pendaftaran Merek	Persentase Merek Terdaftar	71%	TW I	1. Penghitungan permohonan merek; 2. Melaksanakan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan merek.	100%	1. Laporan permohonan merek (memuat jumlah permohonan dan permohonan merek yang terdaftar); 2. Laporan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan merek.
				TW II	1. Penghitungan permohonan merek;	100%	1. Laporan permohonan merek (memuat jumlah permohonan dan permohonan merek yang terdaftar);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melaksanakan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan merek; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Permohonan merek Triwulan I Tahun 2026.		2. Laporan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih; 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan merek; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan merek Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan permohonan merek; 2. Melaksanakan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan merek; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Permohonan merek Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan permohonan merek (memuat jumlah permohonan dan permohonan merek yang terdaftar); 2. Laporan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih; 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan merek; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan merek Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan merek; 2. Melaksanakan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih;	100%	1. Laporan permohonan merek (memuat jumlah permohonan dan permohonan merek yang terdaftar); 2. Laporan penguatan merek dan merek kolektif, termasuk Koperasi Merah Putih;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan merek; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Permohonan merek Triwulan III Tahun 2026.		3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan merek; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan merek Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis	Persentase Indikasi Geografis Terdaftar	53%	TW I	1. Penghitungan permohonan Indikasi Geografis; 2. Melaksanakan penguatan forum Indikasi Geografis; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis (memuat jumlah permohonan dan permohonan Indikasi Geografis yang terdaftar); 2. Laporan penguatan forum Indikasi Geografis; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis.
				TW II	1. Penghitungan permohonan Indikasi Geografis; 2. Melaksanakan penguatan forum Indikasi Geografis; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan Indikasi Geografis Triwulan I tahun 2026.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis (memuat jumlah permohonan dan permohonan Indikasi Geografis yang terdaftar); 2. Laporan penguatan forum Indikasi Geografis; 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan Indikasi Geografis Triwulan I tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan permohonan Indikasi Geografis;	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis (memuat jumlah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melaksanakan penguatan forum Indikasi Geografis; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan Indikasi Geografis Triwulan II tahun 2026.		permohonan dan permohonan Indikasi Geografis yang terdaftar); 2. Laporan penguatan forum Indikasi Geografis; 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan Indikasi Geografis Triwulan II tahun 2026.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan Indikasi Geografis; 2. Melaksanakan penguatan forum Indikasi Geografis; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis; dan 4. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan Indikasi Geografis Triwulan III tahun 2026.	100%	1. Laporan permohonan Indikasi Geografis (memuat jumlah permohonan dan permohonan Indikasi Geografis yang terdaftar); 2. Laporan penguatan forum Indikasi Geografis; 3. Laporan monitoring dan evaluasi permohonan Indikasi Geografis; dan 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev permohonan Indikasi Geografis Triwulan I tahun 2026.
4	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek	Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"	84%	TW I	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"; dan	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa Merek yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Merek di tahun berjalan); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Merek.		2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Merek.
				TW II	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"; 2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Merek, dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Merek Triwulan I tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa Merek yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Merek di tahun berjalan); 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Merek; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Merek Triwulan I tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"; 2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Merek, dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Merek Triwulan II tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa Merek yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Merek di tahun berjalan); 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Merek; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Merek Triwulan II tahun 2026.
				TW IV	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik";	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa Merek yang berkinerja baik dan total JF

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Merek, dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Merek Triwulan III tahun 2026.		Pemeriksa Merek di tahun berjalan); 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Merek; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Merek Triwulan III tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan	85%	TW I	1. Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 2. Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang.	100%	1. Laporan penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 2. Laporan asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang.
				TW II	1. Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; 2. Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan paten, DTLST,	100%	1. Laporan Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; 2. Laporan Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi layanan paten, DTLST, dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dan rahasia dagang Semester I Tahun 2026.		rahasia dagang Semester I Tahun 2026.
				TW III	1. Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; 2. Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; 2. Laporan Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; 2. Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang Semester II Tahun 2026.	100%	1. Laporan Penyelesaian permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; 2. Laporan Asistensi permohonan layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi layanan paten, DTLST, dan rahasia dagang Semester II Tahun 2026.
		Tingkat Validasi Sertifikat Paten	92%	TW I	1. Penghitungan permohonan paten yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten	100%	1. Laporan penghitungan permohonan paten <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten.
				TW II	1. Penghitungan permohonan paten yang <i>granted</i> ; dan	100%	1. Laporan penghitungan permohonan paten <i>granted</i> ; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten		2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten.
				TW III	1. Penghitungan permohonan paten yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten	100%	1. Laporan penghitungan permohonan paten <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan paten yang <i>granted</i> ; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten	100%	1. Laporan penghitungan permohonan paten <i>granted</i> ; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan paten.
		Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	92%	TW I	1. Penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.
				TW II	1. Penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.
				TW III	1. Penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.	100%	1. Laporan penghitungan permohonan DTLST yang tercatat; dan 2. Laporan pelaksanaan pelayanan hukum gugatan DTLST.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	92%	TW I	1. Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Laporan Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.
				TW II	1. Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Laporan Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.
				TW III	1. Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Laporan Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.
				TW IV	1. Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.	100%	1. Laporan Penghitungan permohonan rahasia dagang yang tercatat; dan 2. Laporan Pelaksanaan pelayanan hukum gugatan rahasia dagang.
2	Meningkatnya Pendaftaran Paten	Persentase Paten yang Diberi (granted)	36%	TW I	1. Pengidentifikasian permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu;	100%	1. Laporan hasil identifikasi permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Laporan penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; dan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> .		3. Laporan asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; dan 4. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> .
				TW II	1. Pengidentifikasian permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 3. Asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> ; dan 5. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan Paten <i>granted</i> Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil identifikasi permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Laporan penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 3. Laporan asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; 4. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> ; dan 5. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan Paten <i>granted</i> Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pengidentifikasian permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan	100%	1. Laporan hasil identifikasi permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Laporan penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 3. Asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> ; dan 5. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan Paten <i>granted</i> Triwulan II Tahun 2026.		dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 3. Laporan asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; 4. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> ; dan 5. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan Paten <i>granted</i> Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pengidentifikasian permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 3. Asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> ; dan 5. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan Paten <i>granted</i> Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil identifikasi permohonan paten yang diajukan 5 tahun yang lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 2. Laporan penghitungan jumlah paten <i>granted</i> dari permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu dan permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan yang lalu; 3. Laporan asistensi penyelesaian pemeriksaan substantif; 4. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan Paten <i>granted</i> ; dan 5. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan Paten <i>granted</i> Triwulan I Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
3	Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar	100%	TW I	1. Penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; dan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar.	100%	1. Laporan penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar.
				TW II	1. Penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan DTLST terdaftar Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan DTLST terdaftar Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar; dan 3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan DTLST terdaftar Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan DTLST terdaftar Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar; dan	100%	1. Laporan penghitungan jumlah permohonan DTLST dan jumlah DTLST terdaftar; 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan DTLST terdaftar; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan DTLST terdaftar Triwulan III Tahun 2026.		3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan DTLST terdaftar Triwulan III Tahun 2026.
4	Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang	10,5%	TW I	Penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang	100%	Laporan penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang
				TW II	1. Penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang; dan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan rahasia dagang tercatat Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan Penghitungan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan rahasia dagang tercatat Semester I Tahun 2026.
				TW III	1. penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang; dan 2. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan rahasia dagang tercatat Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev tentang peningkatan rahasia dagang tercatat Semester I Tahun 2026.
				TW IV	1. Penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang; dan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan rahasia dagang tercatat Semester II Tahun 2026.	100%	1. Laporan Penghitungan pencatatan perjanjian rahasia dagang; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang peningkatan rahasia dagang tercatat Semester II Tahun 2026.
5	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten	Persentase Pemeriksa Paten	84%	TW I	1. Penghitungan persentase pemeriksa paten dengan kinerja "Baik"; dan	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik" (meliputi total JF Pemeriksa Paten yang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Dengan Kinerja “Baik”			2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Paten.		berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Paten di tahun berjalan); dan 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Paten.
				TW II	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja “Baik”; 2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Paten; dan 3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Paten Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik” (meliputi total JF Pemeriksa Paten yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Paten di tahun berjalan); 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Paten; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Paten Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja “Baik”; 2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Paten; dan 3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Paten Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik” (meliputi total JF Pemeriksa Paten yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Paten di tahun berjalan); 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Paten; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Paten Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Penghitungan persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja “Baik”; 2. Evaluasi kinerja Pemeriksa Paten; dan 3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Paten Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan penghitungan persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik” (meliputi total JF Pemeriksa Paten yang berkinerja baik dan total JF Pemeriksa Paten di tahun berjalan); 2. Laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Paten; dan 3. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja Pemeriksa Paten Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,1 indeks	TW I	Koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri)	100%	Laporan hasil koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri)
				TW II	Koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri)	100%	Laporan hasil koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri)
				TW III	Koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri)	100%	Laporan hasil koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri); dan 2. Melakukan pengukuran Indeks Pemanfaatan Kerja Sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual.	100%	1. Laporan hasil koordinasi terkait pemanfaatan kerja sama KI (dalam maupun luar negeri); dan 2. Laporan hasil pengukuran Indeks Pemanfaatan Kerja Sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
	Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat	60%	TW I	1. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan 2. Melakukan penghitungan persentase KI yang dimanfaatkan yang terdiri dari perbandingan jumlah permohonan perpanjangan/pasca pendaftaran KI yang diajukan terhadap jumlah pendaftaran/pencatatan KI .	100%	1. Laporan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan 2. Laporan persentase KI yang dimanfaatkan.
				TW II	1. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan 2. Melakukan penghitungan persentase KI yang dimanfaatkan yang terdiri dari perbandingan jumlah permohonan perpanjangan/pasca pendaftaran KI yang diajukan terhadap jumlah pendaftaran/pencatatan KI .	100%	1. Laporan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan 2. Laporan persentase KI yang dimanfaatkan.
				TW III	1. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan	100%	1. Laporan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melakukan penghitungan persentase KI yang dimanfaatkan yang terdiri dari perbandingan jumlah permohonan perpanjangan/ pasca pendaftaran KI yang diajukan terhadap jumlah pendaftaran/pencatatan KI .		2. Laporan persentase KI yang dimanfaatkan.
				TW IV	1. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan 2. Melakukan penghitungan persentase KI yang dimanfaatkan yang terdiri dari perbandingan jumlah permohonan perpanjangan/ pasca pendaftaran KI yang diajukan terhadap jumlah pendaftaran/pencatatan KI .	100%	1. Laporan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan Sentra KI; dan 2. Laporan persentase KI yang dimanfaatkan.
2	Meningkatnya kinerja Analisis Kekayaan Intelektual	Persentase Analisis KI dengan kinerja "Baik"	80%	TW I	Monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI	100%	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI
				TW II	1. Melakukan bimbingan teknis kepada Analisis KI; dan 2. Monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI.	100%	1. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis kepada Analisis KI; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI.
				TW III	Monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI	100%	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI
				TW IV	1. Melakukan bimbingan teknis kepada Analisis KI; dan 2. Monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI.	100%	1. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis kepada Analisis KI; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Analisis KI.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
3	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,4 indeks	TW I	1.Melakukan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Penghitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI.	100%	1.Laporan pelaksanaan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Laporan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KI.
				TW II	1.Melakukan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Penghitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI.	100%	1.Laporan pelaksanaan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Laporan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KI.
				TW III	1.Melakukan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Penghitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI.	100%	1.Laporan pelaksanaan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Laporan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KI.
				TW IV	1.Melakukan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Penghitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI.	100%	1.Laporan pelaksanaan pelatihan terkait KI kepada masyarakat; dan 2. Laporan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KI.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual	76%	TW I	1. Melakukan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI (DJKI - Kanwil Kementerian Hukum); dan 2. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.	100%	1. Laporan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI Pelanggaran KI; dan 2. Laporan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.
				TW II	1. Peningkatan dan pemahaman kepatuhan terhadap hak cipta (royalti); 2. Melakukan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI (DJKI - Kanwil Kementerian Hukum); dan 3. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.	100%	1. Laporan sosialisasi peningkatan dan pemahaman kepatuhan terhadap hak cipta (royalti); 2. Laporan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI; dan 3. Laporan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.
				TW III	1. Peningkatan dan pemahaman kepatuhan terhadap hak cipta (royalti); 2. Melakukan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI (DJKI - Kanwil Kementerian Hukum); dan 3. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.	100%	1. Laporan sosialisasi peningkatan dan pemahaman kepatuhan terhadap hak cipta (royalti); 2. Laporan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI; dan 3. Laporan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Melakukan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI (DJKI - Kanwil Kementerian Hukum); dan 2. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.	100%	1. Laporan koordinasi sinkronisasi data pelanggaran KI Pelanggaran KI; dan 2. Laporan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan aduan pelanggaran KI.
		Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani	60%	TW I	Melakukan penghitungan persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani DJKI dan Kanwil (laporan pengaduan, mediasi dan penutupan situs)	100%	Laporan penyelesaian penanganan pelanggaran KI yang meliputi: a. Laporan pengaduan yang selesai ditangani; b. Laporan penyelesaian sengketa alternatif yang selesai ditangani (mediasi); dan c. Rekomendasi penutupan situs.
				TW II	Melakukan penghitungan persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani DJKI dan Kanwil (laporan pengaduan, mediasi dan penutupan situs)	100%	Laporan penyelesaian penanganan pelanggaran KI meliputi: a. Laporan pengaduan yang selesai ditangani; b. Laporan penyelesaian sengketa alternatif yang selesai ditangani (mediasi); dan c. Rekomendasi penutupan situs.
				TW III	Melakukan penghitungan persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani DJKI dan Kanwil (laporan pengaduan, mediasi dan penutupan situs)	100%	Laporan penyelesaian penanganan pelanggaran KI meliputi:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							a. Laporan pengaduan yang selesai ditangani; b. Laporan penyelesaian sengketa alternatif yang selesai ditangani (mediasi); dan c. Rekomendasi penutupan situs.
				TW IV	Melakukan penghitungan persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani DJKI dan Kanwil (laporan pengaduan, mediasi dan penutupan situs)	100%	Laporan penyelesaian penanganan pelanggaran KI meliputi: a. Laporan pengaduan yang selesai ditangani; b. Laporan penyelesaian sengketa alternatif yang selesai ditangani (mediasi); dan c. Rekomendasi penutupan situs.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual	99,00%	TW I	Transformasi digital integrasi layanan <i>Super Apps</i> Tahap 1 (POP HC, POP Merek, Penelusuran Data KI) ke dalam Production SuperApp.	100%	Laporan pelaksanaan integrasi layanan <i>Super Apps</i> Tahap 1
				TW II	Transformasi digital integrasi layanan <i>Super Apps</i> pengembangan API Tahap 2 (merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan DTLST).	100%	Laporan pelaksanaan integrasi layanan <i>Super Apps</i> Tahap 2
				TW III	Monitoring dan evaluasi integrasi layanan <i>Super Apps</i>	100%	Laporan monitoring evaluasi integrasi layanan <i>Super Apps</i>
				TW IV	1. Melakukan <i>assesment</i> migrasi sistem SIMKI ke IPAS 4; dan 2. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev integrasi layanan <i>Super Apps</i> .	100%	1. Laporan <i>assesment</i> migrasi sistem SIMKI ke IPAS; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev integrasi layanan <i>Super Apps</i> .
		Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia	99,00%	TW I	Inventarisasi total TIK yang tersedia	100%	Laporan inventarisasi total TIK yang tersedia
				TW II	Identifikasi dan penghitungan TIK yang dimanfaatkan terhadap total TIK yang tersedia	100%	Laporan identifikasi dan penghitungan TIK yang dimanfaatkan terhadap total TIK yang tersedia
				TW III	Monitoring dan evaluasi TIK yang dimanfaatkan terhadap total TIK yang tersedia	100%	Laporan monitoring dan evaluasi TIK yang dimanfaatkan terhadap total TIK yang tersedia
				TW IV	Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi TIK yang	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dimanfaatkan terhadap total TIK yang tersedia		dan evaluasi TIK yang dimanfaatkan terhadap total TIK yang tersedia
		Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual	1 Jam	TW I	1. Menyusun SOP <i>Incident Response</i> DJKI dan menetapkan tim respons insiden (CSIRT internal DJKI); dan 2. Implementasi <i>security monitoring</i> (SIEM/SOC dashboard)	100%	1. Laporan Dokumen SOP <i>Incident Response</i> dan Struktur tim CSIRT DJKI; dan 2. Laporan pelaksanaan sistem <i>alert real-time</i> .
				TW II	Implementasi <i>security monitoring</i> (SIEM / SOC dashboard)	100%	Laporan pelaksanaan sistem <i>alert real-time</i>
				TW III	1. Evaluasi MTTR Semester I Tahun 2026; dan 2. Implementasi <i>security monitoring</i> (SIEM / SOC dashboard).	100%	1. Laporan pelaksanaan evaluasi MTTR Semester I Tahun 2026; dan 2. Laporan pelaksanaan sistem <i>alert real-time</i> .
				TW IV	1. Penilaian <i>maturity level respons</i> siber; 2. Penyusunan peta jalan MTTR tahun berikutnya; 3. Implementasi <i>security monitoring</i> (SIEM / SOC dashboard); dan 4. Penyusunan laporan kinerja keamanan siber DJKI.	100%	1. Laporan pelaksanaan penilaian <i>maturity</i> MTTR DJKI; 2. Dokumen target MTTR tahun berikutnya; 3. Laporan pelaksanaan sistem <i>alert real-time</i> ; dan 4. Laporan kinerja keamanan siber DJKI.



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN V
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,27 Indeks	TW I	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. Perencanaan; b. Penyusunan (Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPUU dan/atau Pengharmonisasian RPUU); c. Pembahasan; d. Penetapan; dan e. Pengundangan.	100%	Laporan Triwulan: a. Direktorat Perencanaan; b. Direktorat Perancangan; c. Direktorat HPP I, II dan III; dan d. Direktorat PPPSI.
				TW II	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. Perencanaan; b. Penyusunan (Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPUU dan/atau Pengharmonisasian RPUU); c. Pembahasan; d. Penetapan; dan e. Pengundangan.	100%	Laporan Triwulan: a. Direktorat Perencanaan; b. Direktorat Perancangan; c. Direktorat HPP I, II dan III; dan d. Direktorat PPPSI.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW III	Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. Perencanaan; b. Penyusunan (Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPUU dan/atau Pengharmonisasian RPUU); c. Pembahasan; d. Penetapan; dan a. Pengundangan.	100%	Laporan Triwulan: e. Direktorat Perencanaan; f. Direktorat Perancangan; g. Direktorat HPP I, II dan III; dan h. Direktorat PPPSI.
				TW IV	Pengukuran Indeks Peraturan Perundang-undangan	3,27	Laporan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
				TW I	1. Sosialisasi RKT (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025		temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.		kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.		
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum sesuai perencanaan	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	82%	TW I	1. Pembentukan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres; 2. Melakukan rapat Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU, RPP, Rperpres serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum inisiatif Ditjen PP; dan 3. Melakukan pembahasan RUU inisiatif Kementerian Hukum dengan DPR RI.	100%	1. Dokumen SK Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres; 2. Dokumen matriks perkembangan rancangan peraturan perundang-undangan; dan 3. Surat Presiden hal pembahasan RUU di DPR.
				TW II	1. Melakukan rapat Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum inisiatif Ditjen PP; dan 2. Melakukan pembahasan RUU Inisiatif Kementerian Hukum dengan DPR RI.	100%	1. Dokumen matriks perkembangan rancangan peraturan perundang-undangan; dan 2. Laporan perkembangan pembahasan RUU.
				TW III	1. Melakukan rapat Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum inisiatif Ditjen PP; dan 2. Melakukan pembahasan RUU Inisiatif Kementerian Hukum dengan DPR RI.	100%	1. Dokumen matriks perkembangan rancangan peraturan perundang-undangan; dan 2. Laporan perkembangan pembahasan RUU.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Laporan Tahunan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Melakukan rapat Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum inisiatif Ditjen PP; b. Melakukan pembahasan RUU Inisiatif Kementerian Hukum dengan DPR RI pres, RPermenkum Inisiatif Kementerian Hukum; dan c. Penyusunan laporan perkembangan rancangan peraturan perundang-undangan.	100%	Laporan Tahunan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Melakukan rapat Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum inisiatif Ditjen PP; b. Melakukan pembahasan RUU Inisiatif Kementerian Hukum dengan DPR RI pres, RPermenkum Inisiatif Kementerian Hukum; dan c. Penyusunan laporan perkembangan rancangan peraturan perundang-undangan.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Pembinaan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Berkualitas	80%	TW I	Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan d. Melaksanakan monitoring fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.	100%	Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan d. Monitoring dan evaluasi fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.
				TW II	Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkada oleh	100%	Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan d. Melaksanakan monitoring fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.		d. Monitoring dan evaluasi fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.
				TW III	Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan d. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; e. Melaksanakan monitoring fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.	100%	Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan d. Fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; e. Monitoring dan evaluasi fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.
				TW IV	1. Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;	100%	1. Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					c. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; d. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkara oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan e. Melaksanakan monitoring fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah; serta 2. Melaksanakan Anugerah Legislasi Daerah.		c. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; d. Fasilitasi konsultasi perancangan perda dan perkara oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan e. Monitoring dan evaluasi fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah; serta 2. Laporan Pelaksanaan Anugerah Legislasi Daerah.
2	Meningkatnya kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan rekomendasi kenaikan jenjang	77%	TW I	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Menyusun Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;	100%	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Penyusunan Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.		e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.
				TW II	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Melaksanakan uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melakukan rapat kerjasama pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; f. Melaksanakan kegiatan Monev pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;	100%	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Rekomendasi kenaikan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melakukan rapat kerjasama pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; f. Melaksanakan kegiatan Monev pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					g. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan h. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.		g. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan h. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.
				TW III	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Menyusun Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.	100%	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. Penyusunan Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Melaksanakan uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan f. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.	100%	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Rekomendasi kenaikan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan f. Membuat Akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Penyelesaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	82%	TW I	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; dan 2. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan.	100%	1. SK Tim Kerja Harmonisasi; dan 2. Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan).
				TW II	Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan	100%	Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan		rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
				TW III	Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan	100%	Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
				TW IV	Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi,	100%	Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					informasi, digitalisasi, dan peradilan		digitalisasi, dan peradilan yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan)

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan PUU	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	82%	TW I	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat; dan 2. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat.	100%	1. Surat Perintah Tim Kerja Harmonisasi; dan 2. Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan).
				TW II	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka Pelaksanaan pengharmonisasian,	100%	1. Surat Perintah Tim Kerja Harmonisasi; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat; dan 2. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat.		2. Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan).
				TW III	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat; dan 2. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat.	100%	1. Surat Perintah Tim Kerja Harmonisasi; dan 2. Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan).
				TW IV	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka Pelaksanaan pengharmonisasian,	100%	1. Surat Perintah Tim Kerja Harmonisasi; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat; dan 2. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat.		2. Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN III**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Penyelesaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan Peraturan	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan Peraturan	82%	TW I	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian; dan 2. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi	100%	1. SK Tim Kerja Harmonisasi; dan 2. Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Perundang-undangan	Perundang-undangan			terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian.		
				TW II	Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian	100%	Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan)
				TW III	Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian	100%	Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan)
				TW IV	Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian	100%	Laporan pelaksanaan harmonisasi (meliputi penghitungan persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan)

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Pembinaan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Berkualitas	80%	TW I	Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: 1. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 2. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 3. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan 4. Melaksanakan monitoring fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.	100%	Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan d. Monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.
				TW II	Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;	100%	Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					c. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan d. Melaksanakan monitoring fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.		c. Fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan d. Monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.
				TW III	Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; d. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan e. Melaksanakan monitoring fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.	100%	Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi: a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; d. Fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan e. Monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.
				TW IV	1. Melakukan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi:	100%	1. Laporan fasilitasi perancangan Perda dan Perkada yang meliputi:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Menyusun kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Melakukan pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Melakukan fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; d. Melaksanakan fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan e. Melaksanakan monitoring fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah; serta 2. Melaksanakan Anugerah Legislasi Daerah.		a. Konsep kebijakan teknis fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Pemetaan dan evaluasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. Fasilitasi, supervisi, dan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; d. Fasilitasi konsultasi perancangan Perda dan Perkada oleh DPRD, Pemda, dan Kanwil Kementerian Hukum; dan e. Monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah; serta 2. Laporan pelaksanaan Anugerah Legislasi Daerah.
2	Meningkatnya kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan rekomendasi kenaikan jenjang	77%	TW I	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Menyusun Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/	100%	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Penyusunan Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.		c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.
				TW II	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/	100%	Laporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Melaksanakan uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melakukan rapat kerjasama pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; f. Melaksanakan kegiatan Monev pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; g. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan h. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.		Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Rekomendasi kenaikan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melakukan rapat kerjasama pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; f. Melaksanakan kegiatan Monev pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; g. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan h. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.
				TW III	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Menyusun Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada	100%	Laporan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Penyusunan Tim Kerja Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.		Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Pemetaan JF Perancang PUU yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang; dan f. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.
				TW IV	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/	100%	Laporan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga/

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Melaksanakan uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan f. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.		Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Rekomendasi kenaikan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebutuhan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan f. Membuat akun Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-perancang.go.id.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Dimanfaatkannya Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-	Persentase Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian Peraturan	82%	TW I	1. Penguatan Strategi Litigasi Proaktif dalam Penguatan Politik Hukum Nasional yang meliputi: a. Inisiasi inventarisir Permohonan;	100%	1. Laporan Inventarisasi yang memuat: a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Undangan Di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-undang Melalui Nonlitigasi	Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang Dimanfaatkan			b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; c. Identifikasi UU dan RUU viral; dan d. Penyusunan SK Tim penanganan JR KUHP dan KUHAP serta turunannya; 2. Pelaksanaan Kajian dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (apabila permohonan dikabulkan); dan 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam penanganan JR melalui litigasi.		c. Identifikasi UU dan RUU viral; dan d. Penyusunan SK Tim penanganan JR KUHP dan KUHAP serta turunannya; 2. Laporan tindak lanjut putusan MK yang mengabulkan (jika tidak ada maka menggunakan Surat Keterangan); dan 3. Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai.
				TW II	1. Penguatan Strategi Litigasi Proaktif dalam Penguatan Politik Hukum Nasional yang memuat: a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; dan c. Identifikasi UU dan RUU viral; serta 2. Pelaksanaan Kajian dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (apabila permohonan dikabulkan).	100%	1. Laporan Inventarisari yang memuat: a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; dan c. Identifikasi UU dan RUU viral; serta 2. Laporan tindak lanjut putusan MK yang mengabulkan (jika tidak ada maka menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	1. Penguatan Strategi Litigasi Proaktif dalam Penguatan	100%	1. Laporan Inventarisasi yang memuat:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Politik Hukum Nasional yang meliputi: a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; dan c. Identifikasi UU dan RUU viral; 2. Pelaksanaan Kajian dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (apabila permohonan dikabulkan; dan 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam penanganan JR melalui litigasi.		a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; dan c. Identifikasi UU dan RUU viral; 2. Laporan tindak lanjut putusan MK yang mengabulkan (jika tidak ada maka menggunakan Surat Keterangan); dan 3. Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai.
				TW IV	1. Penguatan Strategi Litigasi Proaktif dalam Penguatan Politik Hukum Nasional yang memuat: a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; dan c. Identifikasi UU dan RUU viral; serta 2. Pelaksanaan Kajian dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (apabila permohonan dikabulkan.	100%	1. Laporan Inventarisari yang memuat: a. Inisiasi inventarisir Permohonan; b. Inisiasi penyusunan <i>draft</i> keterangan presiden; dan c. Identifikasi UU dan RUU viral; serta 2. Laporan tindak lanjut putusan MK yang mengabulkan (jika tidak ada maka menggunakan Surat Keterangan).
		Persentase penyelesaian	82%	TW I	1. Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerin	100%	1. Laporan pelaksanaan Koordinasi lintas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui Nonlitigasi			tah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Penyusunan draft pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Melakukan perhitungan persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi		kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Laporan Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Laporan penyusunan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Laporan penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.
				TW II	1. Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,	100%	1. Laporan pelaksanaan Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Penyusunan draft pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Melakukan perhitungan persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.		Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Laporan Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Laporan penyusunan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Laporan penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.
				TW III	1. Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP;	100%	1. Laporan pelaksanaan Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Laporan Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Laporan penyusunan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Penyusunan draft pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Melakukan perhitungan persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.		4. Laporan penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.
				TW IV	1. Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Penyusunan draft pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Melakukan perhitungan persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.	100%	1. Laporan pelaksanaan Koordinasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri atau yang setara) melalui non-litigasi; 2. Laporan Inventarisasi permohonan sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui non-litigasi yang masuk ke Ditjen PP; 3. Laporan penyusunan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>); dan 4. Laporan penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui non-litigasi.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan	92%	TW I	1. Menyusun Tim Kerja dalam rangka Pelaksanaan Pengundangan dan Tim Kerja dalam rangka Pendokumentasian; dan 2. Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja; dan 2. Laporan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan.
				TW II	Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100%	Laporan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan
				TW III	Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100%	Laporan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan
				TW IV	Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100%	Laporan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian peraturan
2	Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan,	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang	86%	TW I	1. Penyusunan SK Tim Kerja Penerjemahan; dan 2. Melaksanakan proses penerjemahan peraturan perundang-undangan.	100%	1. SK Tim Kerja Penerjemahan; dan 2. Laporan penerjemahan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. Persiapan penerjemahan peraturan perundang-undangan; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Diterjemahkan dan Dipublikasikan	diterjemahkan sesuai Pengajuan					b. Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang- undangan.
				TW II	Melaksanakan proses penerjemahan peraturan perundang-undangan	100%	Laporan penerjemahan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. Persiapan penerjemahan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang- undangan.
				TW III	Melaksanakan proses penerjemahan peraturan perundang-undangan	100%	Laporan penerjemahan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. Persiapan penerjemahan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang- undangan.
				TW IV	Melaksanakan proses penerjemahan peraturan perundang-undangan	100%	Laporan penerjemahan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. Persiapan penerjemahan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang- undangan.
3	Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasikan	86%	TW I	1. Menyusun SK Tim Kerja Publikasi; dan 2. Melaksanakan proses publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Persiapan penerbitan dan penyebaran Jurnal Legislasi Indonesia;	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja Publikasi; dan 2. Laporan publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Persiapan penerbitan dan penyebaran Jurnal Legislasi Indonesia; b. Pelaksanaan penerbitan dan penyebaran Jurnal Legislasi Indonesia;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; c. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; d. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; dan f. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia.		c. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; d. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; dan f. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia.
				TW II	Melaksanakan proses publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Pelaksanaan evaluasi serta penyempurnaan SOP Pengelolaan Publikasi Jurnal Legislasi Indonesia; b. Peningkatan sistem melalui pembaruan <i>open journal system</i>; c. Persiapan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; d. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia;	100%	Laporan publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Laporan pelaksanaan evaluasi serta penyempurnaan SOP Pengelolaan Publikasi Jurnal Legislasi Indonesia; b. Laporan peningkatan sistem melalui pembaruan <i>open journal system</i>; c. Persiapan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; d. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					e. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; f. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; g. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; dan h. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia.		f. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; g. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; dan h. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia.
				TW III	Melaksanakan proses publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Persiapan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; b. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; c. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; d. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; dan f. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia.	100%	Laporan publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Persiapan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; b. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; c. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; d. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; dan f. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Melaksanakan proses publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Persiapan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; b. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; c. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; d. Koordinasi Penerbitan dan Penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Pengelolaan perpustakaan dan bahan hukum; f. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; dan g. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Jurnal Legislasi Indonesia.	100%	Laporan publikasi peraturan perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang meliputi: a. Persiapan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; b. Pelaksanaan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; c. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; d. Koordinasi penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; e. Pengelolaan Perpustakaan dan Bahan Hukum; f. Pelaporan penerbitan dan penyebarluasan Jurnal Legislasi Indonesia; dan g. Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan Jurnal Legislasi Indonesia.
4	Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan	Tingkat Ketersediaan (<i>Availability Time</i>) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan	92%	TW I	1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data/bahan; 2. Pembentukan SK tim kerja untuk masing-masing kegiatan; 3. Pelaksanaan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan;	100%	1. Laporan persiapan pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data/bahan; 2. Dokumen SK tim kerja; 3. Laporan pelaksanaan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 5. Sosialisasi pemanfaatan website peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 6. Pelaksanaan pengelolaan SPBE; 7. Pengelolaan satu data Ditjen PP; dan 8. Melakukan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.		4. Laporan pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 5. Laporan sosialisasi pemanfaatan website peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 6. Laporan pelaksanaan pengelolaan SPBE; 7. Laporan pengelolaan satu data Ditjen PP; dan 8. Laporan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
				TW II	1. Pelaksanaan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan; 2. Pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Sosialisasi pemanfaatan website peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 4. Pemeliharaan aplikasi Ditjen PP; 5. Pengelolaan satu data Ditjen PP; dan 6. Melakukan pemantauan sistem informasi pembentukan	100%	1. Laporan pelaksanaan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan; 2. Laporan pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Laporan sosialisasi pemanfaatan website peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 4. Laporan pemeliharaan aplikasi Ditjen PP; 5. Laporan pengelolaan satu data Ditjen PP; dan 6. Laporan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					peraturan perundang-undangan.		
				TW III	1. Pelaksanaan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan; 2. Pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Sosialisasi pemanfaatan website peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 4. Pemeliharaan aplikasi Ditjen PP; 5. Pengelolaan satu data Ditjen PP; 6. Pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan 7. Melakukan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.	100%	1. Laporan pelaksanaan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan; 2. Laporan pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Laporan sosialisasi pemanfaatan website peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 4. Laporan pemeliharaan aplikasi Ditjen PP; 5. Laporan pengelolaan satu data Ditjen PP; 6. Laporan pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan 7. Laporan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
				TW IV	1. Pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan; 2. Pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Pemeliharaan aplikasi Ditjen PP; 4. Pengelolaan satu data Ditjen PP;	100%	1. Laporan pengelolaan relasi peraturan perundang-undangan; 2. Laporan pengembangan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Laporan pemeliharaan aplikasi Ditjen PP; 4. Laporan pengelolaan satu data Ditjen PP;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					5. Pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan 6. Melakukan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.		5. Laporan pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan 6. Laporan pemantauan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan.


MENTERI HUKUM,
SUPRATMAN ANDI AGTAS

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Hukum	Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum	3,25 (Level 3)	TW I	1. Pelaksanaan rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan 4. Monitoring progres pemenuhan tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi BPKP Tahun 2025.	100%	1. Laporan hasil rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Laporan hasil rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Laporan hasil monitoring TL hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan 4. Laporan Monev KAPIP yang memuat progres pemenuhan tindak lanjut AOI dan progres pemenuhan data dukung penilaian mandiri.
				TW II	1. Pelaksanaan rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;	100%	1. Laporan hasil rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Laporan hasil rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Laporan hasil monitoring TL hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan 5. Monitoring progres pemenuhan tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi BPKP Tahun 2025.		4. Laporan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi; dan 5. Laporan Monev KAPIP yang memuat progres pemenuhan tindak lanjut AOI dan progres pemenuhan data dukung penilaian mandiri.
				TW III	1. Pelaksanaan rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 4. Monitoring progres pemenuhan tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi KAPIP BPKP Tahun 2025; dan 5. Penilaian mandiri kapabilitas APIP 2026.	100%	1. Laporan hasil rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Laporan hasil rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Laporan hasil monitoring TL hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 4. Laporan Monev KAPIP yang memuat progres pemenuhan tindak lanjut AOI dan progres pemenuhan data dukung penilaian mandiri; dan 5. Laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;	100%	1. Laporan hasil rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; 2. Laporan hasil rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal); 3. Laporan hasil monitoring TL hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					4. Pelaksanaan evaluasi MR; 5. Monitoring progres pemenuhan tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi BPKP Tahun 2025; dan 6. Menyusun matriks TL atas hasil evaluasi KAPIP 2026.		4. Laporan hasil evaluasi MR; 5. Laporan Monev KAPIP yang memuat progres pemenuhan tindak lanjut AOI dan progres pemenuhan data dukung penilaian mandiri; dan 6. Matriks TL AOI atas hasil evaluasi KAPIP 2026.
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW I	1. Sosialisasi RKT (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat temuan bisa

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).		menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di Inspektorat Jenderal	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.		Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP	88,5%	TW I	1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025.	100%	1. Matrik rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP; dan 2. Laporan monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025.
				TW II	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025; dan 2. Pemenuhan data dukung kapabilitas APIP tahun 2026.	100%	1. Laporan ,monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025; dan 2. Dokumen pemenuhan data dukung kapabilitas APIP tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025; dan	100%	1. Laporan Monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Pemenuhan data dukung kapabilitas APIP tahun 2026.		2. Dokumen pemenuhan data dukung kapabilitas APIP tahun 2026
				TW IV	Monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025	100%	Laporan monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AOI atas hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2025

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT WILAYAH I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti	82%	TW I	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW II	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW IV	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	77%	TW I	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW II	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW III	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW IV	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
3	Terlaksananya Tindak Lanjut	Persentase tindak lanjut	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Rekomendasi SPIP	rekomendasi SPIP		TW II	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dan surat pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas.
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan IV Tahun 2026		Pencapaian Tujuan) Triwulan IV Tahun 2026.
4	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan III Tahun 2026; 2. Evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 3. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan III Tahun 2026; 2. Laporan hasil evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I; dan 3. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan I Tahun 2026		peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I Triwulan IV Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT WILAYAH II**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terselesaikanny a tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti	82%	TW I	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW II	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW III	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW IV	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.		2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	77%	TW I	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW II	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW III	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW IV	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
3	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dan surat pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan IV Tahun 2026	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan IV Tahun 2026.
4	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK	91%		sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan II Tahun 2026		penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan III Tahun 2026; 2. Evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 3. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan III Tahun 2026; 2. Laporan hasil evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II; dan 3. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.
				TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Inspektorat Wilayah II Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan IV Tahun 2026.		Inspektorat Wilayah II Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II Triwulan IV Tahun 2026.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT WILAYAH III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti	82%	TW I	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW II	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III.		
				TW III	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW IV	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	77%	TW I	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW II	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW III	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW IV	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
3	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dan surat pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas.
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan IV Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan IV Tahun 2026		
4	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan III Tahun 2026; 2. Evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 3. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan III Tahun 2026; 2. Laporan hasil evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III; dan 3. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan I Tahun 2026		maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III Triwulan IV Tahun 2026.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT WILAYAH IV

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait	82%	TW I	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	kepada Kementerian Hukum	pengawasan intern yang ditindaklanjuti			2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV.		2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW II	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW III	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW IV	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi	Persentase tindak lanjut rekomendasi	77%	TW I	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		TW II	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW III	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW IV	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
3	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dan surat pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas.
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan IV Tahun 2026	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan IV Tahun 2026.
4	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan III Tahun 2026;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Inspektorat Wilayah IV Triwulan III Tahun 2026; 2. Evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 3. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.		2. Laporan hasil evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV; dan 3. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Inspektorat Wilayah IV Triwulan IV Tahun 2026.		Inspektorat Wilayah IV Triwulan IV Tahun 2026.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT WILAYAH V

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti	82%	TW I	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW II	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW III	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.		2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
				TW IV	1. Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 2. Rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.	100%	1. Laporan penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 2. Berita acara rekonsiliasi data pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	77%	TW I	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW II	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW III	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
				TW IV	Rekonsiliasi data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)	100%	Laporan pengelolaan data hasil pengawasan (TL Temuan Internal dan TL Temuan Eksternal)
3	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi.		Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan I Tahun 2026; dan 2. Laporan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dan surat pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas.
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan IV Tahun 2026	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP (Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan) Triwulan IV Tahun 2026.
4	Terlaksananya Tindak Lanjut		91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Rekomendasi MRI	Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI		TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan I Tahun 2026
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan III Tahun 2026; 2. Evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 3. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan III Tahun 2026; 2. Laporan hasil evaluasi manajemen risiko sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V; dan 3. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait MRI Triwulan IV Tahun 2026.
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK	91%	TW I	Koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP	100%	Laporan hasil koordinasi persiapan pelaksanaan PM dan PK SPIP
				TW II	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan I Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan II Tahun 2026	100%	Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK Triwulan II Tahun 2026
				TW IV	1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan IV Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi TL AOI peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait IEPK sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V Triwulan IV Tahun 2026.



 MENTERI HUKUM,



 SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VII
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional	3,71 Indeks	TW I	1. Evaluasi terhadap pelaksanaan survei yang dilakukan pada tahun 2025; 2. Membentuk tim kerja untuk menyusun Standar Pelayanan terkait informasi hukum dan pembinaan JDIHN; 3. Menyusun <i>draft</i> /konsep standar pelayanan; 4. Melakukan publikasi informasi hukum serta promosi layanan melalui media sosial; 5. Optimalisasi sistem JDIHN; dan 6. Pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional.	100%	1. Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan survei yang dilakukan pada tahun 2025; 2. Dokumen SK Tim Kerja; 3. Dokumen <i>draft</i> standar pelayanan; 4. Laporan publikasi dan promosi melalui media sosial atau JDIHN; 5. Laporan pelaksanaan optimalisasi sistem JDIHN; dan 6. Laporan pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional.
				TW II	1. Pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional; 2. Penetapan standar pelayanan; 3. Melakukan publikasi informasi hukum serta promosi layanan melalui media sosial; 4. Optimalisasi sistem JDIHN; dan	100%	1. Laporan pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional yang memuat hasil survei, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan survei; 2. Dokumen standar pelayanan; 3. Laporan publikasi dan promosi melalui media sosial atau JDIHN;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					5. Monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum.		4. Laporan pelaksanaan optimalisasi sistem JDIHN; dan 5. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kinerja PBH.
				TW III	1. Pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional; 2. Melakukan publikasi informasi hukum serta promosi layanan melalui media sosial; dan 3. Monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum.	100%	1. Laporan pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional yang memuat hasil survei, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan survei; 2. Laporan publikasi dan promosi melalui media sosial atau JDIHN; dan 3. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja PBH.
				TW IV	Pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional	3,71	Laporan pelaksanaan survei layanan pembinaan hukum nasional yang memuat hasil survei, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan survei
2	Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	0,73 Nilai	TW I	1. Pembentukan Tim Kerja; 2. Rapat internal Tim Kerja; 3. Penyusunan pedoman penyuluhan hukum; dan 4. Sosialisasi pedoman penyuluhan hukum kepada Penyuluh Hukum.	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja; 2. Dokumen rapat Tim Kerja (undangan, absensi, notula, dan dokumentasi); 3. Dokumen pedoman penyuluhan hukum; dan 4. Laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman penyuluhan hukum.
				TW II	1. Implementasi pedoman penyuluhan hukum; dan 2. Monitoring pelaksanaan penyuluhan hukum.	100%	1. Laporan implementasi pedoman penyuluhan hukum; dan 2. Laporan monitoring pelaksanaan penyuluhan hukum.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
3	Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	0,95 Nilai	TW III	1. Evaluasi pedoman penyuluhan hukum; 2. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi implementasi pedoman penyuluhan hukum; dan 3. Pemetaan permasalahan hukum.	100%	1. Laporan hasil evaluasi pedoman penyuluhan hukum; 2. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi implementasi pedoman penyuluhan hukum; dan 3. Dokumen hasil pemetaan permasalahan hukum.
				TW IV	Pengukuran Indeks Kepatutan Hukum Masyarakat	0,73 Nilai	Dokumen nilai Indeks Kepatutan Hukum Masyarakat
				TW I	1. Pembentukan tim; 2. Rapat internal tim dan penyusunan tahapan kegiatan; dan 3. Koordinasi antar lembaga hukum.	100%	1. Dokumen SK Tim; 2. Laporan rapat (undangan, absensi, notula, dan dokumentasi) hasil koordinasi dengan lembaga hukum; dan 3. Laporan pelaksanaan koordinasi antar lembaga hukum.
				TW II	1. Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka pengumpulan data; 2. Monitoring data lembaga hukum; dan 3. <i>Expert meeting</i> .	100%	1. Laporan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengumpulan data; 2. Laporan monitoring data lembaga hukum; dan 3. Laporan <i>expert meeting</i> .
				TW III	1. Pengolahan data administratif K/L dan data hasil wawancara dengan <i>expert</i> dilakukan melalui diskusi dengan narasumber; dan 2. Pengolahan data administratif K/L dan data hasil wawancara	100%	1. Laporan pelaksanaan diskusi dengan narasumber; dan 2. Dokumen rapat pengolahan data (undangan, absensi, notula, dan dokumentasi).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dengan expert dilakukan melalui rapat pengolahan data.		
				TW IV	Penghitungan Indeks Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	0,95 Nilai	Dokumen nilai Indeks Kepatutan Hukum Lembaga Hukum
4	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional	50%	TW I	1. Pembentukan tim; dan 2. Rapat internal tim dan penyusunan tahapan kegiatan.	100%	1. Dokumen SK Tim; dan 2. Dokumen rapat (undangan, absensi, notula, dan dokumentasi).
				TW II	Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka pengumpulan data dengan K/L terkait	100%	Laporan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dengan K/L terkait
				TW III	1. Rapat internal tim dalam rangka pengolahan data awal; dan 2. FGD/seminar/temu pakar dengan narasumber (<i>expert</i> , akademisi, dan/atau praktisi).	100%	1. Dokumen rapat (undangan, absensi, notula, dan dokumentasi); dan 2. Laporan pelaksanaan FGD/seminar/temu pakar.
				TW IV	Penyusunan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional	50%	Laporan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional
5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW I	1. Sosialisasi RKT (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							(Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.		terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.		2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya kepatuhan K/L/Pemda terhadap pelaksanaan hukum	Persentase kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum	75%	TW I	1. Pembentukan Tim Penilaian Kepatuhan Hukum K/L/D; dan 2. Sosialisasi pelaksanaan penilaian kepatuhan hukum kepada K/L/D.	100%	1. Dokumen SK Tim Penilaian Kepatuhan Hukum K/L/D; dan 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi penilaian kepatuhan hukum kepada K/L/D.
				TW II	Pelaksanaan penilaian kepatuhan hukum K/L/D (Tahap I)	100%	Laporan pelaksanaan penilaian kepatuhan hukum K/L/D (Tahap I)
				TW III	Pelaksanaan penilaian kepatuhan hukum K/L/D (Tahap II)	100%	Laporan pelaksanaan penilaian kepatuhan hukum K/L/D (Tahap II)
				TW IV	Penyusunan hasil penilaian kepatuhan hukum K/L/D	100%	Laporan penyusunan hasil penilaian kepatuhan hukum K/L/D
2	Terwujudnya Reformasi Hukum di Lingkungan K/L/D	Persentase K/L/D yang Berhasil Melakukan Reformasi Hukum	75%	TW I	1. Pembentukan Tim Penilai Nasional, Tim Sekretariat Nasional, dan Tim Sekretariat Wilayah;	100%	1. SK Tim Penilai Nasional, Tim Sekretariat Nasional, dan Tim Sekretariat Wilayah;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Melaksanakan sosialisasi penilaian IRH kepada Tim Sekretariat Wilayah dan K/L; 3. Pendampingan K/L oleh Tim Sekretariat Nasional; dan 4. Monitoring Tim Sekretariat Wilayah dalam mendampingi Pemerintah Daerah.		2. Laporan pelaksanaan sosialisasi penilaian IRH kepada Tim Sekretariat Wilayah dan K/L (undangan rapat, absensi, notulensi, dan dokumentasi penilaian IRH dengan K/L/D); 3. Laporan pendampingan K/L oleh Tim Sekretariat Nasional; dan 4. Laporan monitoring Tim Sekretariat Wilayah dalam mendampingi Pemerintah Daerah.
				TW II	Pelaksanaan penilaian IRH K/L/D	100%	Berita Acara dan Surat Hasil Penetapan Penilaian IRH
				TW III	Melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian IRH	100%	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian IRH
				TW IV	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian IRH	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian IRH pelaksanaan dan hasil penilaian IRH
3	Meningkatnya K/L yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang	Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.	75%	TW I	1. Pembentukan tim monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang; dan 2. Rapat persiapan Tim monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.	100%	1. SK Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang; dan 2. Undangan rapat, absensi, notulensi, dan dokumentasi rapat persiapan tim monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.
				TW II	Monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan	100%	Laporan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan K/L (Tahap I)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Undang-Undang dengan K/L (Tahap I)		
				TW III	Monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan K/L (Tahap II)	100%	Laporan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan K/L (Tahap II)
				TW IV	Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring pemantauan dan peninjauan Undang-Undang	100%	Laporan pelaksanaan monitoring pemantauan dan peninjauan Undang-Undang

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Kualitas Analisis Hukum	Persentase Analisis Hukum yang Naik Jenjang	6%	TW I	1. Pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; dan 2. Sosialisasi uji kompetensi kenaikan jenjang Analisis Hukum Periode I.	100%	1. Laporan pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; dan 2. Laporan sosialisasi kegiatan uji kompetensi teknis kenaikan jenjang Analisis Hukum Periode I.
				TW II	1. Pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; 2. Evaluasi pelaksanaan forum diskusi analisis hukum Triwulan I Tahun 2026; dan 3. Pelaksanaan uji kompetensi teknis analisis hukum Periode I.	100%	1. Laporan pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; 2. Laporan evaluasi pelaksanaan forum diskusi analisis hukum Triwulan I Tahun 2026; dan 3. Laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi teknis analisis hukum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; dan 2. Evaluasi pelaksanaan forum diskusi analisis hukum Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; dan 2. Laporan evaluasi pelaksanaan forum diskusi analisis hukum Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; 2. Evaluasi pelaksanaan forum diskusi analisis hukum Triwulan III Tahun 2026; 3. Pelaksanaan uji kompetensi teknis analisis hukum Periode II; dan 4. Penyusunan laporan pelaksanaan uji kompetensi teknis kenaikan jenjang analisis hukum.	100%	1. Laporan pelaksanaan forum diskusi analisis hukum; 2. Laporan evaluasi pelaksanaan forum diskusi analisis hukum Triwulan III Tahun 2026; 3. Laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi teknis analisis hukum Periode II; dan 4. Laporan pelaksanaan uji kompetensi teknis kenaikan jenjang analisis hukum.
2	Meningkatnya tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L	73%	TW I	1. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan; dan 2. Penyampaian rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga.	100%	1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan 2. Surat penyampaian rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga.
				TW II	1. Pelaksanaan rapat forum penyampaian hasil analisis dan evaluasi peraturan	100%	1. Laporan rapat forum penyampaian hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada pemangku

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					perundang-undangan pada pemangku kepentingan; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan.		kepentingan (undangan rapat, daftar hadir, notula, dan dokumentasi); dan 2. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan.
				TW III	Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga dan Ditjen PP) untuk mendorong tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi	100%	Laporan koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi
				TW IV	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	100%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas	Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum terhadap Standar Pelayanan	85%	TW I	1. Pembentukan tim penyusunan pedoman standar pelayanan; 2. Inventarisasi permasalahan dan kebutuhan penyusunan pedoman; dan 3. Penyusunan konsep pedoman standar layanan.	100%	1. Dokumen SK Tim Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan; 2. Laporan hasil inventarisasi permasalahan dan kebutuhan penyusunan pedoman; dan 3. Dokumen konsep pedoman standar layanan.
				TW II	1. Finalisasi penyusunan pedoman standar layanan; dan 2. Pelaksanaan sosialisasi pedoman standar layanan.	100%	1. Dokumen pedoman standar layanan; dan 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman standar layanan.
				TW III	1. Pelaksanaan sosialisasi pedoman standar layanan; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman standar layanan.	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman standar layanan; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman standar layanan.
				TW IV	1. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi implementasi pedoman standar layanan; dan 2. Penyusunan laporan kepatuhan standar layanan informasi hukum.	100%	1. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi implementasi pedoman standar layanan; dan 2. Laporan kepatuhan standar layanan informasi hukum,
		Persentase dokumen hukum yang diakses	60%	TW I	1. Pengolahan dan penyajian informasi hukum dalam berbagai bentuk dan media agar lebih mudah dipahami	100%	1. Laporan hasil pengolahan dan penyajian informasi hukum; dan 2. Laporan data statistik akses dokumen hukum JDIHN.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		terhadap dokumen hukum yang tersedia			dan informatif sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan 2. Pengoptimalisasian sistem JDIHN.		
				TW II	1. Pengolahan dan penyajian informasi hukum dalam berbagai bentuk dan media agar lebih mudah dipahami dan informatif sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan 2. Pengoptimalisasian sistem JDIHN.	100%	1. Laporan hasil pengolahan dan penyajian informasi hukum; dan 2. Laporan data statistik akses dokumen hukum JDIHN.
				TW III	1. Pengolahan dan penyajian informasi hukum dalam berbagai bentuk dan media agar lebih mudah dipahami dan informatif sesuai dengan kebutuhan pengguna; 2. Pengoptimalisasian sistem JDIHN; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian informasi dan optimalisasi sistem JDIHN.	100%	1. Laporan hasil pengolahan dan penyajian informasi hukum; 2. Laporan data statistik akses dokumen hukum JDIHN; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian informasi dan optimalisasi sistem JDIHN.
				TW IV	1. Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian informasi dan optimalisasi sistem JDIHN; dan 2. Penyusunan laporan pelaksanaan pengolahan dan penyajian informasi dan optimalisasi sistem JDIHN.	100%	1. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian informasi dan optimalisasi sistem JDIHN; dan 2. Laporan pelaksanaan pengolahan dan penyajian informasi dan optimalisasi sistem JDIHN.
2	Terwujudnya Pengelolaan	Persentase anggota JDIHN yang dikelola	100%	TW I	1. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan JDIHN kepada Kantor Wilayah;	100%	1. Laporan bimbingan teknis pembinaan JDIHN kepada Kantor Wilayah;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Keanggotaan JDIHN	terhadap total anggota JDIHN			2. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; dan 3. Pemutakhiran data anggota JDIHN.		2. Laporan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; dan 3. Laporan pemutakhiran anggota JDIHN.
				TW II	1. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; 2. Pemutakhiran data anggota JDIHN; dan 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Semester I Tahun 2026.	100%	1. Laporan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; 2. Laporan pemutakhiran anggota JDIHN; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Semester I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; dan 2. Pemutakhiran data anggota JDIHN.	100%	1. Laporan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; dan 2. Laporan pemutakhiran anggota JDIHN.
				TW IV	1. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; 2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah terkait penyelenggaraan pelaporan kinerja anggota JDIHN; 3. Pemutakhiran data anggota JDIHN; 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Semester I Tahun 2026; dan	100%	1. Laporan fasilitasi koordinasi dan konsultasi pengelolaan JDIH kepada K/L; 2. Undangan, absensi, notula, dan dokumentasi rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah terkait penyelenggaraan pelaporan kinerja anggota JDIHN; 3. Laporan pemutakhiran anggota JDIHN; 4. Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					5. Penyusunan laporan kegiatan pembinaan anggota JDIHN.		informasi hukum Semester I Tahun 2026; dan 5. Laporan kegiatan pembinaan anggota JDIHN.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan penyuluhan hukum nasional	Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan	85 %	TW I	1. Pembentukan tim kerja penyusunan standar layanan penyuluhan hukum; 2. Penyusunan standar layanan penyuluhan hukum; dan 3. Pemetaan pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum atau sejenisnya.	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan Standar Layanan Penyuluhan Hukum; 2. Dokumen standar layanan penyuluhan hukum; dan 3. Dokumen hasil pemetaan pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum atau sejenisnya.
				TW II	1. Pelaksanaan sosialisasi/koordinasi standar layanan penyuluhan hukum kepada Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan terkait; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi/koordinasi standar layanan penyuluhan hukum kepada Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan terkait; dan 2. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan Triwulan III Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan layanan penyuluhan hukum.	100%	1. Laporan hasil monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan penyuluhan hukum Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan layanan penyuluhan hukum.
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum	Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan	85 %	TW I	1. Pembentukan Panitia Pengawas Pusat (Panwaspus); 2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan Diklat paralegal; dan 3. Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan hukum.	100%	1. Dokumen SK Panitia Pengawas Pusat (Panwaspus); 2. Pedoman penyelenggaraan Diklat paralegal; dan 3. Pedoman penyelenggaraan bantuan hukum.
				TW II	1. Peningkatan kapasitas Panitia Pengawas Daerah (Panwasda); dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan kegiatan peningkatan kapasitas Panwasda; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan III Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan III Tahun 2026; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBH Triwulan IV Tahun 2026; dan 3. Penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja PBH.	100%	1. Laporan monitoring tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja PBH Triwulan III Tahun 2026; 2. Laporan monitoring dan evaluasi PBH Triwulan IV Tahun 2026; dan 3. Laporan hasil evaluasi kinerja PBH.
3	Terbangunnya Budaya Hukum Masyarakat	Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum	3.09 Indeks	TW I	1. Pembentukan tim kerja penyusunan materi penyuluhan hukum; 2. Penyusunan materi penyuluhan hukum; dan 3. Penyusunan <i>post assesment</i> kepada masyarakat terkait materi penyuluhan hukum.	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan Materi Penyuluhan Hukum; 2. Dokumen materi penyuluhan hukum; dan 3. Dokumen <i>post assesment</i> terkait materi penyuluhan hukum.
				TW II	1. Pelaksanaan sosialisasi materi penyuluhan hukum dan <i>post assesment</i> terkait materi penyuluhan hukum kepada Penyuluh Hukum; 2. Inventarisasi hasil <i>post assesment</i> terhadap materi penyuluhan hukum Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan sosialisasi materi penyuluhan hukum dan <i>post assesment</i> terkait materi penyuluhan hukum kepada Penyuluh Hukum; 2. Dokumen hasil inventarisasi hasil <i>post assesment</i> terhadap materi penyuluhan hukum Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Inventarisasi hasil <i>post assesment</i> terhadap materi penyuluhan hukum Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Melakukan pengelolaan atas hasil <i>post assesment</i> .	100%	1. Dokumen hasil inventarisasi hasil <i>post assesment</i> terhadap materi penyuluhan hukum Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil pengelolaan atas hasil <i>post assesment</i> .
				TW IV	Penyusunan laporan hasil Indeks Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum (berisi rekomendasi atas materi penyuluhan hukum dan <i>post assesment</i> yang diberikan)	100%	Laporan hasil Indeks Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum (berisi rekomendasi atas materi penyuluhan hukum dan <i>post assesment</i> yang diberikan)
		Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar	85%	TW I	1. Pembentukan tim kerja pembinaan Posbankum; 2. Penyusunan pedoman posbankum; 3. Penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan Juru Damai (<i>Peacemaker Training</i>); dan 4. Rapat Persiapan Pembinaan Posbankum Desa Kelurahan dengan <i>stakeholder</i> .	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan; 2. Pedoman Posbankum; 3. Pedoman pelaksanaan pelatihan Juru Damai (<i>Peacemaker Training</i>); dan 4. undangan, absensi, notula, dan dokumentasi rapat persiapan pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan dengan <i>stakeholder</i> .
				TW II	1. Pelaksanaan sosialisasi pedoman Posbankum dan pelaksanaan pelatihan Juru Damai (<i>Peacemaker Training</i>) kepada Kantor Wilayah; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keaktifan Posbankum; dan 3. Pelaksanaan pelatihan Juru Damai (<i>Peacemaker Training</i>).	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman Posbankum dan pelaksanaan pelatihan Juru Damai (<i>Peacemaker Training</i>) kepada Kantor Wilayah; 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi keaktifan Posbankum; dan 3. Laporan pelaksanaan pelatihan Juru Damai (<i>Peacemaker Training</i>).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi keaktifan Posbankum; dan 2. Pelaksanaan pembinaan kepada Kantor Wilayah dalam melaksanakan pendampingan terhadap Posbankum di wilayah kerjanya.	100%	1. Laporan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi keaktifan Posbankum; dan 2. Laporan pelaksanaan pembinaan kepada Kantor Wilayah dalam melaksanakan pendampingan terhadap Posbankum di wilayah kerjanya.
				TW IV	Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan/ pendampingan Posbankum Desa/Kelurahan	100%	Laporan pelaksanaan pembinaan/pendampingan Posbankum Desa/Kelurahan
4	Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum	Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang	6 %	TW I	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum; dan 2. Sosialisasi uji kompetensi kenaikan jenjang Penyuluh Hukum Periode I.	100%	1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum; dan 2. Laporan sosialisasi kegiatan uji kompetensi teknis kenaikan jenjang Penyuluh Hukum Periode I.
				TW II	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum; 2. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum Triwulan I Tahun 2026; dan 3. Pelaksanaan uji kompetensi teknis Penyuluh Hukum Periode I.	100%	1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum; 2. Laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum Triwulan I Tahun 2026; dan 3. Laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi teknis Penyuluh Hukum Periode I.
				TW III	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum; dan 2. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum; dan 2. Laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum;	100%	1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum Triwulan III Tahun 2026; 3. Pelaksanaan uji kompetensi teknis Penyuluh Hukum Periode II; dan 4. Penyusunan laporan pelaksanaan uji kompetensi teknis kenaikan jenjang Penyuluh Hukum.		2. Laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Hukum Triwulan III Tahun 2026; 3. Laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi teknis Penyuluh Hukum Periode II; dan 4. Laporan pelaksanaan uji kompetensi teknis kenaikan jenjang Penyuluh Hukum.


MENTERI HUKUM,
SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VIII
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	80 Indeks	TW I	1. Pembentukan tim kerja pelaksana pendamping pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum; dan 2. Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum.	100%	1. Dokumen SK Tim Pelaksana Pendamping Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum; dan 2. Laporan sosialisasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum.
				TW II	Melakukan pendampingan data dukung pengukuran IKK Kementrian Hukum	100%	Laporan hasil pendampingan data dukung pengukuran IKK Kementerian Hukum
				TW III	Melakukan <i>self assessment</i> atas pelaksanaan IKK Kementerian Hukum	100%	Laporan hasil <i>self assessment</i> atas pelaksanaan IKK Kementerian Hukum
				TW IV	Pelaksanaan evaluasi penilaian IKK Kementerian Hukum	80 Indeks	Laporan hasil evaluasi pengukuran IKK Kementerian Hukum
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	Indeks Reformasi Birokrasi General	87,40 Indeks	TW I	1. Sosialisasi RKT RB (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Kementerian Hukum	Kementerian Hukum		TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).		2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.		hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.		2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti	95,5%	TW I	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW II	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW III	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW IV	Analisis strategi kebijakan	95,5%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di	95,5%	TW I	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW II	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti		TW III	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW IV	Analisis strategi kebijakan	95,5%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti	95,5%	TW I	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW II	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW III	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW IV	Analisis strategi kebijakan	95,5%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti	95,5%	TW I	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW II	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW III	Analisis strategi kebijakan	100%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)
				TW IV	Analisis strategi kebijakan	95,5%	Keluaran analisis kebijakan (Naskah Kebijakan/ <i>Policy Brief/ Policy Paper</i>)


MENTERI HUKUM,
SUPRATMAN ANDI AGTAS

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	6,6 Indeks	TW I	1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2026 sesuai dengan peta jalan pengembangan kompetensi; 2. Pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekpin; 3. Pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan; 5. Pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Penyusunan dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Penyusunan dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.	100%	1. Dokumen perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2026; 2. Laporan pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekpin; 3. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan; 5. Laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.
				TW II	1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan	100%	1. Dokumen perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					penilaian kompetensi tahun 2026 sesuai dengan peta jalan pengembangan kompetensi; 2. Pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekipin; 3. Pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan; 5. Pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Penyusunan dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Penyusunan dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.		dan penilaian kompetensi tahun 2026; 2. Laporan pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekipin; 3. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan; 5. Laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.
				TW III	1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2026 sesuai dengan peta jalan pengembangan kompetensi; 2. Pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekipin; 3. Pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan;	100%	1. Dokumen perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2026; 2. Laporan pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekipin; 3. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan;

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					5. Pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Penyusunan dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Penyusunan dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.		5. Laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.
				TW IV	1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2026 sesuai dengan peta jalan pengembangan kompetensi; 2. Pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekpin; 3. Pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan; 5. Pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Penyusunan dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Penyusunan dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.	100%	1. Dokumen perencanaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2026; 2. Laporan pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Poltekpin; 3. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan fungsional; 4. Laporan pelaksanaan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan; 5. Laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; 6. Dokumen target perencanaan pengembangan kompetensi di bidang hukum bagi K/L dan Pemda; dan 7. Dokumen target penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pengayoman Indonesia.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
2	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	3,52 Indeks	TW I	1. Penyusunan standar layanan pengembangan kompetensi sdm bidang hukum tahun 2026; dan 2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi.	100%	1. Dokumen standar layanan/maklumat layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum tahun 2026; dan 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi.
				TW II	1. Evaluasi pelaksanaan layanan pengembangan kompetensi SDM Triwulan I Tahun 2026 dan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Triwulan I Tahun 2026 dan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi.
				TW III	1. Evaluasi pelaksanaan layanan pengembangan kompetensi SDM Triwulan II Tahun 2026 dan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Triwulan II Tahun 2026 dan rencana tindak lanjut pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Triwulan III Tahun 2026; dan 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi.
				TW IV	1. Evaluasi pelaksanaan layanan pengembangan kompetensi SDM Triwulan IV Tahun 2026;	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi; dan 3. Evaluasi penyelenggaraan layanan pengembangan kompetensi tahun 2026.		kompetensi Triwulan IV Tahun 2026; 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Peserta terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi; dan 3. Laporan capaian target dan evaluasi penyelenggaraan layanan pengembangan kompetensi tahun 2026.
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,40 Indeks	TW I	1. Sosialisasi RKT RB (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal) (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
				TW III	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025 (jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan); dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							(Inspektorat Jenderal) (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan).
2	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	90,5	TW I		0%	
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan	100%	1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kualitas hasil pelaksanaan anggaran; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.		2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026.
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 indeks	TW I	Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	100%	Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
				TW II	1. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Pelaksanaan Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan Triwulan III Tahun 2026.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum	Tingkat Kepatuhan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan	80%	TW I	Penghitungan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum	100%	Laporan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM bidang hukum
				TW II	1. Penghitungan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi laporan kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi laporan kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penghitungan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi laporan kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi laporan kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Persentase ASN Bidang Hukum yang Telah Mengikuti penilaian kompetensi	92%	TW IV	1. Penghitungan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi laporan kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan tingkat kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi laporan kepatuhan layanan penilaian kompetensi SDM di bidang hukum terhadap standar pelayanan penilaian Triwulan III Tahun 2026.
				TW I	Penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum
				TW II	Penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum
				TW III	Penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum
				TW IV	Penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di bidang hukum
		Persentase hasil penilaian kompetensi yang di tindaklanjuti	92%	TW I	Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum	100%	Laporan hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum
				TW II	1. Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian	100%	1. Laporan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum Triwulan I Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kompetensi SDM di bidang hukum Triwulan I Tahun 2026.		
				TW III	1. Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM di bidang hukum Triwulan III Tahun 2026.
2	Meningkatnya penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi	87%	TW I	Penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum
				TW II	Penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum
				TW III	Penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi	100%	Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum
		Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum Kementerian Hukum	96%	TW I	1. Pengukuran peningkatan kompetensi peserta pelatihan bidang hukum; dan 2. Penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.	100%	1. Laporan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ; dan 2. Laporan penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.
				TW II	1. Pengukuran peningkatan kompetensi peserta pelatihan bidang hukum; dan 2. Penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.	100%	1. Laporan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ; dan 2. Laporan penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.
				TW III	1. Pengukuran peningkatan kompetensi peserta pelatihan bidang hukum; dan 2. Penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.	100%	1. Laporan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ; dan 2. Laporan penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.
				TW IV	1. Pengukuran peningkatan kompetensi peserta pelatihan bidang hukum; dan 2. Penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.	100%	1. Laporan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ; dan 2. Laporan penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan bidang hukum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Persentase hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum yang ditindaklanjuti	92%	TW I	Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum	100%	Laporan hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum
				TW II	1. Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Pelaksanaan Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan hasil Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi Monev pemanfaatan hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA PUSAT PENGEMBANGAN FUNGSIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional Hukum	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan fungsional Hukum terhadap Standar Pelayanan	80%	TW I		0%	
				TW II	1. Melaksanakan Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan I (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>); d. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan II (Metode PJJ); dan e. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama; serta 2. Tindak Lanjut rekomendasi hasil Survei kepatuhan standar layanan pelatihan fungsional Hukum tahun 2026:	100%	1. Laporan Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan I (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>); d. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan II (Metode PJJ); dan e. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama.		
				TW III	1. Melaksanakan Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan	100%	1. Laporan Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan III (Metode PJJ); dan d. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>); serta 2. Tindak Lanjut rekomendasi hasil Survei kepatuhan standar layanan pelatihan fungsional Hukum tahun 2026: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan III (Metode PJJ); dan d. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>).		
				TW IV	1. Survei kepatuhan standar layanan pelatihan fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>);	100%	1. Laporan Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut hasil Survei Kepatuhan Standar Layanan Pelatihan Fungsional Hukum Triwulan III Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Pelatihan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama PNB (Metode Klasikal); dan d. Pelatihan Fungsional Kurator Keperdataan (Metode PJJ); serta 2. Tindak Lanjut hasil Survei kepatuhan standar layanan pelatihan fungsional Hukum Tahun 2026: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama PNB (Metode Klasikal); dan d. Pelatihan Fungsional Kurator Keperdataan (Metode PJJ).		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum	92%	TW I		0%	
				TW II	1. Pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan I (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>); d. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan II (Metode PJJ); dan e. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama; serta 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Metode <i>Blended Learning</i>);	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan Fungsional Hukum (meliputi hasil evaluasi); dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi Fungsional Hukum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan I (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>); d. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan II (Metode PJJ); dan e. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama.		
				TW III	1. Pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan III (Metode PJJ); dan d. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan I	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan Fungsional Hukum (meliputi hasil evaluasi); dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi Fungsional Hukum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					(Metode <i>Blended Learning</i>); serta 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan III (Metode PJJ); dan d. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan I (Metode <i>Blended Learning</i>).		
				TW IV	1. Pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan Fungsional Hukum (meliputi hasil evaluasi); dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi Fungsional Hukum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Pertama PNB (Metode Klasikal); dan d. Pelatihan Fungsional Kurator Keperdataan (Metode PJJ); serta 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: a. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Angkatan II (Metode <i>Blended Learning</i>); b. Pelatihan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Metode PJJ); c. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama PNB (Metode Klasikal); dan d. Pelatihan Fungsional Kurator Keperdataan (Metode PJJ).		
		Persentase alumni peserta pelatihan Fungsional Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni	92%	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III		0%	
				TW IV	Melakukan evaluasi pasca pelatihan Jabatan Fungsional Terbuka (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analisis Hukum dan Penyuluh Hukum) Tahun Anggaran 2025	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan Jabatan Fungsional Terbuka (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analisis Hukum dan Penyuluh Hukum) Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
2	Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum	Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi fungsional ASN Kementerian Hukum	92%	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III		0%	
				TW IV	Melakukan evaluasi pasca pelatihan Jabatan Fungsional Terbuka (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum) Tahun Anggaran 2025	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan terkait pelatihan Jabatan Fungsional Terbuka (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum) Tahun Anggaran 2025
		Persentase alumni peserta Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni	92%	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III		0%	
				TW IV	Melakukan evaluasi pasca pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya: Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional Terbuka (Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan) Tahun Anggaran 2025	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan Fungsional ASN Jabatan Fungsional Terbuka di Lingkungan Kementerian Hukum
		Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi	92%	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III		0%	
				TW IV	Melakukan evaluasi pasca pelatihan Jabatan Fungsional	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan terkait pelatihan Jabatan Fungsional

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		fungsiional ASN Kementerian Hukum			Terbuka (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum) Tahun Anggaran 2025		Terbuka (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum) Tahun Anggaran 2025
		Persentase alumni peserta Pelatihan Fungsiional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni	92%	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III		0%	
				TW IV	Melakukan evaluasi pasca pelatihan Fungsiional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya: Alumni Pelatihan Jabatan Fungsiional Terbuka (Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan) Tahun Anggaran 2025	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan Fungsiional ASN Jabatan Fungsiional Terbuka di Lingkungan Kementerian Hukum
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III		0%	
				TW IV	Pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok Pelatihan Fungsiional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya	100%	Laporan hasil pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok Pelatihan Fungsiional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II		0%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		kompetensi JF Analis Hukum pada tahun berjalan		TW III	Pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	100%	Laporan pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda
				TW IV	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Pengukuran Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil Pengukuran Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Kurator Keperdataan pada tahun berjalan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III	Pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan	100%	Laporan hasil pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
				TW IV	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil Pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Penyuluh Hukum pada tahun berjalan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II	Pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	100%	Laporan hasil pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama
				TW III	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama
				TW IV		0%	
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analis Kekayaan Intelektual pada tahun berjalan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III	Penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	100%	Laporan hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual Ahli Pertama
				TW IV	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada jabatan fungsional	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Kekayaan Intelektual Ahli Pertama		
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Desain Industri pada tahun berjalan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II	Penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama	100%	Laporan hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama
				TW III	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama
				TW IV		0%	
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Merek pada Tahun berjalan	6,5 Indeks	TW I		0%	
				TW II	Penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama	100%	Laporan hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama
				TW III	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Paten pada Tahun berjalan	6,5 Indeks		Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama		pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama
				TW IV		0%	
				TW I		0%	
				TW II		0%	
				TW III	Penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama	100%	Laporan hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama
				TW IV	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama	100%	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil penghitungan penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok dari hasil evaluasi <i>pretest</i> dan <i>post test</i> peserta pelatihan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama

RENCANA KERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIK DAN KEPEMIMPINAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan ASN Kementerian Hukum	Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum	92%	TW I	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum
				TW II	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan Triwulan II Tahun 2026.	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan Triwulan III Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
2		Persentase alumni peserta pelatihan Fungsional Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni	92%	TW I	1. Penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan; dan 2. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan.	100%	1. Dokumen pedoman pelaksanaan pelatihan; dan 2. Laporan evaluasi pasca pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum.
				TW II	Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum
				TW III	Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum
				TW IV	Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum
	Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan teknis dan kepemimpinan SDM Hukum terhadap Standar Pelayanan	80%	TW I		0%	
				TW II	Penghitungan tingkat kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum: a. TOF Implementasi KUHP Akt. I-IV.	100%	Laporan tingkat kepatuhan layanan pelatihan bidang hukum
				TW III	1. Penghitungan tingkat kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum: a. Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak; dan b. TOF Implementasi KUHP Akt. V-VIII; serta 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penghitungan tingkat	100%	1. Laporan tingkat kepatuhan layanan pelatihan bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penghitungan tingkat kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum Triwulan II Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum Triwulan II Tahun 2026: a. TOF Implementasi KUHP Akt. I-IV.		
				TW IV	1. Penghitungan tingkat kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum: a. TOF Implementasi KUHP Akt. IX-XI; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penghitungan tingkat kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum Triwulan III Tahun 2026: a. Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak; dan b. TOF Implementasi KUHP Akt. V-VIII.	100%	1. Laporan tingkat kepatuhan layanan pelatihan bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penghitungan tingkat kepatuhan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan pelatihan bidang hukum Triwulan III Tahun 2026.
		Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan	92%	TW I		0%	
				TW II	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bidang hukum: a. TOF Implementasi KUHP Akt. I-IV.	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan bidang hukum
				TW III	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bidang hukum:	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		kepemimpinan SDM hukum			a. Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak; dan b. TOF Implementasi KUHP Akt. V-VIII; serta 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi bidang hukum Triwulan II Tahun 2026: a. TOF Implementasi KUHP Akt. I-IV.		kompetensi bidang hukum Triwulan II Tahun 2026.
				TW IV	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bidang hukum: a. TOF Implementasi KUHP Akt. IX-XI; dan 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi bidang hukum Triwulan III Tahun 2026: a. Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak; dan b. TOF Implementasi KUHP Akt. V-VIII.	100%	1. Laporan penyelenggaraan pelatihan bidang hukum; dan 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi bidang hukum Triwulan III Tahun 2026.
		Persentase Alumni Peserta Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum yang Meningkatkan Kinerjanya	92%	TW I	1. Penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan; dan 2. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan.	100%	1. Dokumen pedoman pelaksanaan pelatihan; dan 2. Laporan evaluasi pasca pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum.
				TW II	Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan.	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan bidang hukum.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi			Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		terhadap Total Alumni		TW III	Pelaksanaan pelatihan.	evaluasi	pasca	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan bidang hukum.
				TW IV	Pelaksanaan pelatihan.	evaluasi	pasca	100%	Laporan evaluasi pasca pelatihan bidang hukum.


MENTERI HUKUM
SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN X
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan; dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).
				TW III	1. Menyampaikan hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025.	100%	1. Surat penyampaian hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025.
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).		2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,90	TW I	1. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan keprotokoleran; 3. Melaksanakan peliputan kehumasan; 4. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta uang lembur pegawai; 5. Melaksanakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor; 6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BMN; 8. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Triwulan IV Tahun 2025;	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; 2. Laporan keprotokoleran; 3. Laporan peliputan kehumasan; 4. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta uang lembur pegawai; 5. Laporan pelaksanaan layanan perkantoran; 6. Laporan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN; 8. Laporan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Laporan administrasi dan pengelolaan kepegawaian; 10. Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2025; 11. Laporan hasil evaluasi mandiri AKIP; 12. Laporan pemantauan manajemen risiko; 13. Laporan monitoring dan evaluasi SPIP;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					11. Melaksanakan evaluasi mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah; 12. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko satuan kerja; 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP; 14. Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025; 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan; 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Melakukan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif Kementerian Hukum; dan 21. Melaksanakan Survei Integritas, SPKP dan SPAK.		14. Dokumen LKJIP Tahun 2025; 15. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Dokumen hasil evaluasi SOP dan SP; 18. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Laporan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif; dan 21. Laporan hasil Survei Integritas, SPKP, dan SPAK.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan keprotokoleran; 3. Melaksanakan peliputan kehumasan; 4. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta uang lembur pegawai; 5. Melaksanakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor; 6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BMN; 8. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Triwulan IV Tahun 2025; 11. Melaksanakan evaluasi mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah; 12. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko satuan kerja;	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; 2. Laporan keprotokoleran; 3. Laporan peliputan kehumasan; 4. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta uang lembur pegawai; 5. Laporan pelaksanaan layanan perkantoran; 6. Laporan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN; 8. Laporan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Laporan administrasi dan pengelolaan kepegawaian; 10. Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2025; 11. Laporan hasil evaluasi mandiri AKIP; 12. Laporan pemantauan manajemen risiko; 13. Laporan monitoring dan evaluasi SPIP; 14. Dokumen LKJIP Tahun 2025; 15. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP; 14. Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025; 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan; 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Melakukan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif Kementerian Hukum; dan 21. Melaksanakan Survei Integritas, SPKP dan SPAK.		17. Dokumen hasil evaluasi SOP dan SP; 18. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Laporan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif; dan 21. Laporan hasil Survei Integritas, SPKP, dan SPAK.
				TW III	1. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan keprotokoleran;	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; 2. Laporan keprotokoleran; 3. Laporan peliputan kehumasan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melaksanakan peliputan kehumasan; 4. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta uang lembur pegawai; 5. Melaksanakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor; 6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BMN; 8. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Triwulan IV Tahun 2025; 11. Melaksanakan evaluasi mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah; 12. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko satuan kerja; 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP; 14. Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025;		4. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta uang lembur pegawai; 5. Laporan pelaksanaan layanan perkantoran; 6. Laporan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN; 8. Laporan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Laporan administrasi dan pengelolaan kepegawaian; 10. Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2025; 11. Laporan hasil evaluasi mandiri AKIP; 12. Laporan pemantauan manajemen risiko; 13. Laporan monitoring dan evaluasi SPIP; 14. Dokumen LKJIP Tahun 2025; 15. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Dokumen hasil evaluasi SOP dan SP; 18. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan; 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Melakukan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif Kementerian Hukum; dan 21. Melaksanakan Survei Integritas, SPKP dan SPAK.		20. Laporan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif; dan 21. Laporan hasil Survei Integritas, SPKP, dan SPAK.
				TW IV	Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	3,90 Indeks	Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
3	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan	95,5%	TW I	1. Melakukan pembentukan tim kerja; dan 2. Melaksanakan rapat pembahasan isu/permasalahan kebijakan dalam rangka analisis	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja; dan 2. Dokumen hasil rapat pembahasan isu/permasalahan kebijakan dalam rangka analisis implementasi kebijakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Hukum di Wilayah			implementasi kebijakan dan analisis kebijakan di bidang hukum.		dan analisis kebijakan di bidang hukum.
				TW II	Penyusunan proposal/desain analisis kebijakan di bidang hukum/AIEK	100%	Dokumen proposal/desain analisis kebijakan di bidang hukum/AIEK
				TW III	1. Melaksanakan pengumpulan data lapangan analisis kebijakan di bidang hukum/Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di wilayah; dan 2. Menyusun keluaran hasil analisis kebijakan berisi rekomendasi kebijakan hasil analisis kebijakan di bidang hukum/analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pengumpulan data; dan 2. Dokumen keluaran hasil analisis kebijakan berisi rekomendasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum/analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di wilayah (<i>Policy Brief</i>).
				TW IV	1. Melaksanakan diseminasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum/forum komunikasi kebijakan di wilayah; 2. Pelaksanaan diskusi strategi kebijakan hukum di wilayah; 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan hasil analisis kebijakan; dan 4. Pengukuran kemanfaatan atau rencana tindak lanjut (RTL) dari stakeholders atas rekomendasi hasil analisis kebijakan di wilayah.	100%	1. Laporan diseminasi hasil analisis kebijakan dibidang hukum di wilayah/forum komunikasi kebijakan di wilayah; 2. Laporan pelaksanaan DSK di wilayah; 3. Surat penyampaian rekomendasi kebijakan hasil analisis kebijakan di bidang hukum di wilayah kepada BSK Hukum dan <i>stakeholders</i> ; dan 4. Dokumen rencana tindak lanjut (RTL) atas rekomendasi hasil analisis kebijakan dibidang hukum di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
4	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindak lanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	15%	TW I	1. Pembentukan tim Monev tindak lanjut analisis dan evaluasi Perda; 2. Perumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3. Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dimonitoring dan dievaluasi; dan 4. Rapat/forum penyampaian hasil analisis dan evaluasi Perda pada pemangku kepentingan.	100%	1. Dokumen SK Tim Monev Tindak Lanjut Analisis dan Evaluasi Perda; 2. Dokumen daftar rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3. Dokumen daftar pemangku kepentingan; dan 4. Laporan rapat/forum penyampaian hasil analisis dan evaluasi Perda pada pemangku kepentingan (undangan rapat, daftar hadir, notula, dan dokumentasi).
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda (luring/daring); dan 2. Koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi.	100%	1. Dokumen monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda (dapat berbentuk gdocs/gsheets agar bersifat <i>live-update</i>); dan 2. Laporan koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi.
				TW III	Koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi	100%	Laporan koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi
				TW IV	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Perda	15%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Perda.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
5	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	TW I	1. Pembentukan tim pengawas daerah pemberian bantuan hukum; dan 2. Koordinasi dan pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum untuk mendukung peningkatan layanan litigasi dan non-litigasi.	100%	1. Dokumen SK Tim Pengawas Daerah Pemberian Bantuan Hukum; dan 2. Laporan koordinasi dengan OBH dan pemerintah daerah (pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum/ <i>baseline</i> , daftar wilayah/OBH yang menjadi sasaran layanan, hasil identifikasi kebutuhan peningkatan layanan).
				TW II	1. Penandatanganan perjanjian kinerja dan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum TA 2026; 2. Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 3. Monev kinerja PBH.	100%	1. Dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum TA 2026; 2. Dokumen data jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (litigasi dan non-litigasi); dan 3. Laporan monev kinerja PBH.
				TW III	1. Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Monev kinerja PBH dan penjangkaran calon PBH.	100%	1. Dokumen data jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Laporan monev kinerja PBH dan penjangkaran calon PBH.
				TW IV	1. Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Monev layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.	100%	1. Dokumen data Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Laporan monev layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
6	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan	70%	TW I	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis pembinaan dan penilaian kinerja anggota JDIHN; dan	100%	1. Laporan keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis pembinaan dan penilaian kinerja anggota JDIHN; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	informasi hukum di wilayah yang berkualitas	dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah			2. Koordinasi dan konsultasi dengan BPHN dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN.		2. Laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan BPHN dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN.
				TW II	Sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah	100%	Laporan sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah
				TW III	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggota JDIHN di wilayah sesuai standar pengelolaan; dan 2. Pemberian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah.	100%	1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggota JDIHN di wilayah sesuai standar pengelolaan; dan 2. Laporan pemberian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah.
				TW IV	1. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembinaan anggota JDIHN di wilayah; dan 2. Evaluasi pelaksanaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.	100%	1. Laporan melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembinaan anggota JDIHN di wilayah; dan 2. Laporan evaluasi pelaksanaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.
7	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	11%	TW I	1. Pembentukan tim kerja pembina pos bantuan hukum tahun 2026; 2. Persiapan fasilitasi pembentukan dan/atau pelaksanaan pembinaan Posbankum; dan 3. Pengumpulan dan penyampaian data	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja Pembina Pos Bantuan Hukum Tahun 2026; 2. Laporan persiapan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan Posbankum; dan 3. Laporan data permasalahan hukum di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					permasalahan hukum di wilayah.		
				TW II	1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Pengumpulan dan penyampaian data permasalahan hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Laporan monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Laporan data permasalahan hukum di wilayah.
				TW III	1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Pengumpulan dan penyampaian data permasalahan hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Laporan monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Laporan data permasalahan hukum di wilayah.
				TW IV	1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan Pos Bantuan Hukum di wilayah; 2. Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Menyusun laporan akhir tahun Pos Bantuan Hukum. .	100%	1. Laporan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan Pos Bantuan Hukum di wilayah; 2. Laporan monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Laporan akhir tahun Pos Bantuan Hukum.
8	Terwujudnya fasilitasi	Persentase perencanaan	100%	TW I	1. Inventarisasi program legislasi (Prolegda) tahun 2026;	100%	1. Dokumen SK Program Legislasi (Prolegda) Tahun 2026;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			2. Penyusunan tim kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah; dan 3. Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Koordinasi Ke Pemerintah Daerah; dan c. Fasilitasi Kantor Wilayah atas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.		2. Dokumen SK Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah; dan 3. Laporan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Koordinasi ke Pemerintah Daerah; dan c. Fasilitasi Kantor Wilayah atas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.
				TW II	Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat	100%	Laporan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).		penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).
				TW III	Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota);	100%	Laporan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan Pelayanan terhadap Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).		Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).
				TW IV	1. Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi, Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi, Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan	100%	1. Laporan perencanaan Peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi, Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi, Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda); serta 2. Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda); serta 2. Monitoring dan evaluasi capaian program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2026.		oleh Kanwil Kementerian Hukum tahun 2026.
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	TW I	1. Menyusun tim kerja dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (Perda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Perkada); 2. Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja; dan 2. Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.
				TW II	Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan	100%	Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.		difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.
				TW III	Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.	100%	Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.
				TW IV	1. Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi:	100%	1. Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada; serta 2. Monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan Ranperda dan Ranperkada.		a. Melaksanakan Rapat Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan Mediasi dan Konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada; serta 2. Laporan monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026
9	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.22 Indeks	TW I	1. Menyusun rencana diseminasi dan sosialisasi layanan AHU di wilayah tahun 2026; 2. Sosialisasi pelayanan AHU (perseroan perorangan); dan 3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	100%	1. Dokumen rencana diseminasi dan sosialisasi layanan AHU di wilayah tahun 2026 (kerangka acuan kegiatan); 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi; dan 3. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.
				TW II	1. Sosialisasi pelayanan AHU (apostille dan legalisasi); 2. Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan 3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi; 2. Laporan pelaksanaan publikasi dan/atau pameran; dan 3. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					terhadap layanan AHU di wilayah.		
				TW III	1. Sosialisasi pelayanan AHU (fidusia dan kewarganegaraan); 2. Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan 3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi; 2. Laporan pelaksanaan publikasi dan/atau pameran; dan 3. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.
				TW IV	1. Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan 2. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan publikasi dan/atau pameran; dan 2. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.
10	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	TW I	1. Pembentukan tim percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan melibatkan seluruh MPD; dan 2. Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat.	100%	1. Dokumen SK Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan melibatkan seluruh MPD; dan 2. Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat.
				TW II	Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat
				TW III	Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	98,20%	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat
11	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	TW I	- Melakukan identifikasi potensi jenis KI di daerah setempat yang memuat: - Identifikasi potensi KI personal meliputi merek, paten, DI, dan HC (mendata lagu daerah); - Identifikasi potensi KI komunal: IG, KIK, dan merek kolektif; dan - Melakukan inventarisasi KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); - Menyampaikan inventarisasi SOP layanan KI di wilayah; - Melakukan edukasi/ diseminasi terkait perlindungan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, dimana laporan memuat informasi terkait: - Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik);	100%	- Dokumen identifikasi potensi jenis KI di daerah setempat yang memuat: - Identifikasi potensi KI personal: merek, paten, DI, dan HC (mendata lagu daerah); - Identifikasi potensi KI komunal: IG, KIK, dan merek kolektif; dan - Melakukan inventarisasi KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); - Laporan inventarisasi SOP layanan KI di wilayah; - Laporan edukasi/diseminasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah dimana laporan memuat informasi terkait: - Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); - Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; dan - Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% di banding tahun 2025 pada periode yang sama; serta - Laporan pencatatan data informasi dan pengaduan di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; dan c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; serta 4. Menyampaikan laporan pencatatan data informasi dan pengaduan di wilayah.		
				TW II	1. Melakukan edukasi/ diseminasi terkait perlindungan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. Melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI	100%	1. Laporan edukasi/diseminasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% di banding tahun 2025 pada periode yang sama; d. Melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi <i>dashboard</i> KI); e. Mendampingi pengajuan merek kolektif yang berasal dari KDMP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					(berdasarkan pada informasi <i>dashboard</i> KI); e. Mendampingi pengajuan merek kolektif yang berasal dari KDMP (minimal 25%) yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 12% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan, kriya dll); 2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI; dan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kekayaan intelektual di wilayah.		(minimal 25%) yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 12% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan, kriya dll); 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI; dan 3. Laporan evaluasi dan pelaporan layanan kekayaan intelektual di wilayah.
				TW III	1. Membuat kegiatan promosi layanan KI di <i>booth</i> layanan/pameran dan klinik KI wilayah; 2. Melakukan edukasi/ diseminasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (diprioritaskan untuk	100%	1. Dokumen kegiatan promosi layanan KI di <i>booth</i> layanan/pameran, klinik KI wilayah, kegiatan penelusuran merek dan/atau <i>one stop service</i> layanan KI; 2. Laporan edukasi/ diseminasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (diprioritaskan untuk dilaksanakan pada kawasan berbasis KI yang telah ditetapkan);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dilaksanakan pada kawasan berbasis KI yang telah ditetapkan); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi <i>dashboard</i> KI); dan e. Mendampingi pengajuan permohonan merek kolektif minimal 35% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); serta 3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan KI.		b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% di banding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi <i>dashboard</i> KI); dan e. Mendampingi pengajuan permohonan merek kolektif minimal 35% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); serta 3. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI.
				TW IV	1. Melakukan edukasi/ diseminasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait:	100%	1. Laporan edukasi/ diseminasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi <i>dashboard</i> KI); e. Mendampingi pengajuan minimal 50% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 25% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan); 2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI; dan 3. Menyusun laporan hasil inventarisasi SOP layanan KI di wilayah dan mengikuti		a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi <i>dashboard</i> KI); e. Mendampingi pengajuan minimal 50% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 25% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan); 2. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI; dan 3. Menyusun laporan hasil inventarisasi SOP layanan KI di wilayah dan mengikuti bimbingan atau pendampingan aplikasi <i>dashboard</i> monitoring Kantor Wilayah sebagai dukungan atas hasil pelaksanaan kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					bimbingan atau pendampingan aplikasi <i>dashboard</i> monitoring Kantor Wilayah sebagai dukungan atas hasil pelaksanaan kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan.		
12	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	TW I	1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran KI atau sengketa KI di wilayah (merek, hak cipta, paten, IG, dll) dan melaporkan aduan yang masuk kepada Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait (koordinasi awal dengan DJKI, APH dan pemangku kepentingan terkait); dan 3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.	100%	1. Dokumen identifikasi pelanggaran KI di wilayah (merek, hak cipta, paten, IG, dll); 2. Dokumen kerjasama Pemantauan Pengawasan KI dengan Instansi Terkait (koordinasi awal dengan DJKI, APH dan pemangku kepentingan terkait); dan 3. Laporan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.
				TW II	1. Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI	100%	1. Laporan hasil koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan (apabila tidak ada aduan dapat menggunakan Surat Keterangan); 2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					(mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; 3. melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual; 4. Melakukan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait; dan 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum KI.		3. Laporan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual; 4. Laporan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait; dan 5. Laporan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum KI.
				TW III	1. Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI (mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; dan 3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.	100%	1. Laporan hasil Koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan; 2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI; dan 3. Laporan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI (mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; dan 3. Menyusun laporan capaian penyelesaian aduan pelanggaran KI dan sengketa pelanggaran KI.	100%	1. Laporan hasil koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan; 2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI; dan 3. Laporan capaian penyelesaian aduan pelanggaran KI dan sengketa pelanggaran KI.
13	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level	TW I	1. Pembentukan tim pemenuhan maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; 2. Rapat persiapan internal pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; dan 3. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan KI di daerah yang memuat laporan terkait: a. Menyusun <i>draft</i> PKS antara Kanwil dan 100% Kab/Kota	100%	1. SK Tim Pemenuhan Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah; 2. Dokumen rapat persiapan internal pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; dan 3. Laporan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan KI di daerah, yang memuat laporan terkait: a. Menyusun <i>draft</i> PKS antara Kanwil dan 100% Kab/Kota di wilayah masing-masing untuk mendorong penyusunan Perda KI di wilayah;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					di wilayah masing-masing untuk mendorong penyusunan Perda KI di wilayah; b. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; c. Melaksanakan inventarisasi klaster perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025 di wilayah masing-masing; dan d. Kantor Wilayah mengikuti sosialisasi ruang lingkup PKS yang diselenggarakan oleh DJKI.		b. Laporan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; c. Laporan inventarisasi klaster perguruan tinggi di wilayah masing-masing; dan d. Laporan mengikuti sosialisasi secara daring.
				TW II	1. Rapat persiapan internal terkait pemenuhan data dukung maturitas KI di wilayah; dan 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait peningkatan dan pemanfaatan KI di wilayah yang memuat laporan terkait: a. Melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi (pada kelas mandiri,	100%	1. Dokumen rapat persiapan internal terkait pemenuhan data dukung maturitas KI di wilayah; dan 2. Laporan koordinasi dengan stakeholder terkait peningkatan dan pemanfaatan KI di wilayah yang memuat laporan terkait: a. Melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi (pada kelas mandiri, utama, madya, dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					utama, madya, dan pratama berdasarkan klasifikasi perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025) di wilayah masing-masing untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan		pratama berdasarkan klasifikasi perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025) di wilayah masing-masing untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.		
				TW III	Melakukan pemenuhan data dukung maturitas KI, yang memuat informasi terkait : a. Mengikuti pelaksanaan Survei/Penilaian Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah yang dilaksanakan oleh DJKI; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan	100%	Bukti pemenuhan data dukung maturitas KI (matriks pemenuhan), yang memuat informasi terkait : a. Mengikuti pelaksanaan Survei/Penilaian Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah yang dilaksanakan oleh DJKI; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.		ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.
				TW IV	1. Melakukan pemenuhan data dukung maturitas KI, yang memuat informasi terkait : a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; 2. Finalisasi skor maturitas wilayah dan penyampaian laporan resmi ke pusat; dan 3. Melakukan evaluasi maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah.	100%	1. Laporan informasi data dukung maturitas KI, yang memuat informasi terkait: a. Laporan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; 2. Laporan finalisasi skor maturitas wilayah dan penyampaian laporan resmi ke pusat; dan 3. Laporan evaluasi maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah



 MENTERI HUKUM,
 SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN XI
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BALAI HARTA PENINGGALAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan	98,20%	TW I	1. Menginternalisasikan perjanjian kinerja kepada seluruh pegawai; 2. Penyelesaian permohonan pengguna layanan BHP; dan 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP.	100%	1. Laporan internalisasi perjanjian kinerja BHP dan Laporan Penandatanganan dokumen perjanjian kinerja BHP; 2. Laporan pelaksanaan layanan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, kepailitan, SKHW, dan wasiat, serta koordinasi instansi terkait dan Unit Eselon I; dan 3. Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP (dilengkapi dokumen undangan, absensi, notula, dan dokumentasi kegiatan).
				TW II	1. Penyelesaian permohonan pengguna layanan BHP; 2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP; dan 3. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP Triwulan I Tahun 2026.	100%	1. Laporan pelaksanaan layanan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, kepailitan, SKHW, dan wasiat, serta koordinasi instansi terkait dan Unit Eselon I; 2. Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP (dilengkapi dokumen undangan, absensi, notula, dan dokumentasi kegiatan); dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
							3. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP Triwulan I Tahun 2026.
				TW III	1. Penyelesaian permohonan pengguna layanan BHP; 2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP; dan 3. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP Triwulan II Tahun 2026	100%	1. Laporan pelaksanaan layanan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, kepailitan, SKHW, dan wasiat, serta koordinasi instansi terkait dan Unit Eselon I; 2. Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP (dilengkapi dokumen undangan, absensi, notula dan dokumentasi kegiatan); dan 3. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP Triwulan III Tahun 2026.
				TW IV	1. Penyelesaian permohonan pengguna layanan BHP; 2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP; dan 3. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP Triwulan III Tahun 2026.	100%	1. Laporan pelaksanaan layanan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, kepailitan, SKHW, dan wasiat, serta koordinasi instansi terkait dan Unit Eselon I; 2. Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP (dilengkapi dokumen undangan, absensi, notula dan dokumentasi kegiatan); dan 3. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan BHP Triwulan III Tahun 2026.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP -	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	TW I	1. Sosialisasi RKT RB (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,2 Indeks	TW I	1. Melaksanakan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Monitoring dan evaluasi hasil survei.	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi hasil survei ILK.
				TW II	1. Melaksanakan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Monitoring dan evaluasi hasil survei.	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi hasil survei ILK.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW III	1. Melaksanakan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Monitoring dan evaluasi hasil survei.	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi hasil survei ILK.
				TW IV	1. Melaksanakan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Monitoring dan evaluasi hasil survei.	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan/ILK; dan 2. Laporan monitoring dan evaluasi hasil survei ILK.



 MENTERI HUKUM



 SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN XII
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA BALAI PELATIHAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pelatihan Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pelatihan Hukum	100%	TW I	1. Sosialisasi RKT RB (internal); 2. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 3. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. Laporan sosialisasi (undangan, absensi, notula dan dokumentasi); 2. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 3. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW II	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW III	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.
				TW IV	1. Pemenuhan data dukung RKT RB melalui e-RB; dan 2. Evaluasi RKT RB oleh APIP.	100%	1. <i>Capture</i> pemenuhan RKT RB pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum; dan 2. Berita Acara Hasil Evaluasi APIP.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan	3,93 Indeks	TW I	Melaksanakan survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
				TW II	Melaksanakan survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
				TW III	Melaksanakan survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
				TW IV	Melaksanakan survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi:	100%	Laporan hasil survei kepuasan layanan kesekretariatan yang meliputi: a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan

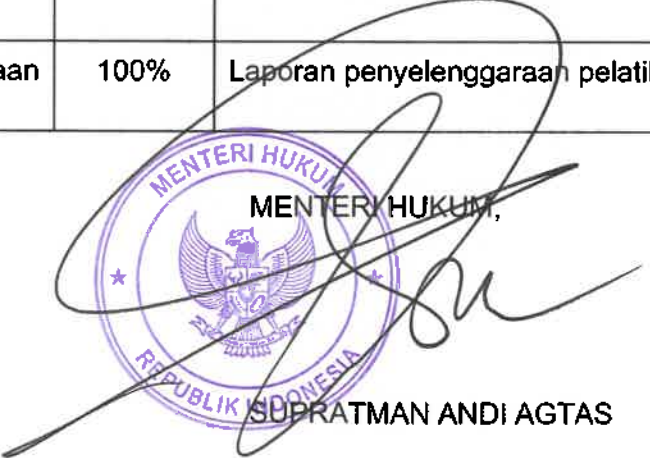
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Pelaksanaan layanan kesekretariatan; dan b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.		b. Pengisian survei kepuasan layanan kesekretariatan.
2	Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum pada Balai Pelatihan Hukum	93%	TW I	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.	100%	Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.
				TW II	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan	100%	Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.		
				TW III	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.	100%	Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.
				TW IV	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan	100%	Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi: a. Penentuan tenaga pengajar yang kapabel; b. Penyediaan modul pembelajaran yang relevan; c. Penyelenggaraan pelatihan; d. Penyebarluasan kuesioner evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					pelatihan kepada peserta; dan e. Evaluasi hasil survei.		
		Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah	96%	TW I	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan
				TW II	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan
				TW III	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan
				TW IV	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan	100%	Laporan penyelenggaraan pelatihan



 MENTERI HUKUM,



 SUPRATMAN ANDI AGTAS